

PEMBERDAYAAN INDUSTRI KERAJINAN KAYU RAKYAT DI DAERAH JAMBI



Penyunting :
Jusmaliani

**PUSLITBANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
JAKARTA, 2000**

PEMBERDAYAAN INDUSTRI KERAJINAN KAYU RAKYAT DI DAERAH JAMBI



PUSLITBANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
Jakarta, 2000

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KTD)

Pemberdayaan Industri Kerajinan Kayu Rakyat Di Daerah Jambi/Penyunting, Jusmaliani.—Cet. 1.
Jusmaliani, Januar R.P. Batubara, Hany Nasution, Joko Suryanto
Jakarta: Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan – LIPI (PEP-LIPI), 2000
xi, 66 hlm, 21 cm.

ISBN 979-9165-10-5

@ Hak pengarang dilindungi Undang-Undang
Cetakan Pertama 2000
Dicetak oleh: CV. Raga Meulaba

Penerbit: Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(PEP-LIPI)
Jalan Gatot Subroto 10, Jakarta
Telepon: 5251542, 5207120 (Langsung); Fax: 5262139



LIPI

KATA PENGANTAR

Penelitian **PEMBERDAYAAN INDUSTRI KERAJINAN KAYU RAKYAT DI DAERAH JAMBI**, merupakan salah satu dari sepuluh penelitian dan atau kegiatan pemberdayaan ekonomi rakyat yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan (PEP-LIPI). Kegiatan ini tergabung dalam Proyek Litbang Potensi Sumber Daya Alam dan Sosial Ekonomi Dan Teknologi Untuk Pengembangan Wilayah-LIPI Tahun Anggaran 1999/2000.

Sebelum menjadi laporan akhir, kegiatan penelitian dan atau pemberdayaan ini telah diuji melalui berbagai tahapan proses penelitian yang panjang dan sangat ketat dalam bentuk diskusi, seminar dan penilaian akhir oleh Tim "Quality Assurance" PEP-LIPI. Dengan demikian, laporan hasil penelitian dan atau kegiatan pemberdayaan ini, secara akademik dapat dipertanggung jawabkan.

Semua kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan laporan penelitian dan atau pemberdayaan ini tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun swasta. Berkewajiban dengan itu kami mengucapkan terima kasih. Kami juga sangat menghargai kerja keras para peneliti dan staf administrasi PEP-LIPI, sehingga berhasil menyajikan laporan penelitian ilmiah yang baik. Harapan kami semoga laporan ini mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pengambilan keputusan atau kepentingan praktis lainnya.

Kami menyadari bahwa laporan ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan adanya masukan berupa kritik dan saran-saran konstruktif guna menyempurnaan laporan-laporan penelitian PEP-LIPI pada masa yang akan datang.

Jakarta, Maret 2000

Kepala Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan-LIPI

Dr. Carunia Mulya Firdausy, MA. APU.
NIP: 320003805

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR BAGAN	ix
ABSTRAK	xi
PETA PROPINSI JAMBI.....	xii

I. PENDAHULUAN: PEMBERDAYAAN SEBAGAI UPAYA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI

Oleh: Jusmaliani, Januar Batubara dan Hany Nasution

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Definisi, Konsep dan Metodologi	2
1.3. Kerangka Pemikiran	3
1.4. Hutan sebagai sumber bahan baku Industri Perkayuan	7
1.5. Penyajian Laporan	12
DAFTAR PUSTAKA	13

II PEMANFAATAN KEUNGGULAN KOMPARATIF DAN INDUSTRI PERKAYUAN JAMBI

Oleh: Hany Nasution dan Joko Suryanto

2.1. Pendahuluan	15
2.2. Perkembangan Konsep dalam Perdagangan Internasional	16
2.3. Hasil Kajian terhadap Komoditi Ekspor Non-Migas Indonesia	19
2.4. Industri Perkayuan Propinsi Jambi	23
2.5. Penutup	31
DAFTAR PUSTAKA	33

III PEMBERDAYAAN INDUSTRI KERAJINAN KAYU RAKYAT

Oleh: Januar Batubara & Jusmaliani

3.1. Pendahuluan	37
3.2. Kerangka Konseptual Pemberdayaan	39
3.3. Pelaksanaan Pemberdayaan	43
3.4. Analisa Ekonomi Proyek	46
3.5. Analisa Finansial	52
3.6. Penutup dan Rencana Evaluasi	58
DAFTAR PUSTAKA	60

IV PROSPEK DAN EVALUASI

Oleh: Tim Peneliti

4.1. Pendahuluan	63
4.2. Prospek	64
4.3. Evaluasi	66



LIPI

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I-1 Luas Kawasan Hutan di Propinsi Jambi Menurut Fungsinya Tahun 1995/1996 – 1997/1998	9
Tabel I-2 Perkembangan IHPK 1996-1997	10
Tabel I-3 Keadaan IHPK 1998 Menurut Kabupaten	10
Tabel II-1 Matrix of Comparative and Competitive Advantage	18
Tabel II-2 Pembagian Kerja Antara Negara-Negara di Asia-Pasifik	21
Tabel II-3 Perkembangan Indeks RCA Negara-negara di Kawasan Asia-Pasifik	21
Tabel II-4 Komposisi Ekspor Tahun 1996.....	23
Tabel II-5 Ekspor Jambi Menurut Negara Tujuan 1993-1997	24
Tabel II-6 Total Ekspor Propinsi Jambi Tahun 1993-1997	25
Tabel II-7 Perkembangan Nilai Ekspor Propinsi Jambi Menurut Sektor Tahun 1993-1997	25
Tabel II-8 Nilai dan Pangsa Ekspor Kayu dan Karet Propinsi Jambi Terhadap Nasional	27
Tabel II-9 Komposisi Jenis Ekspor Kayu Jambi.....	27

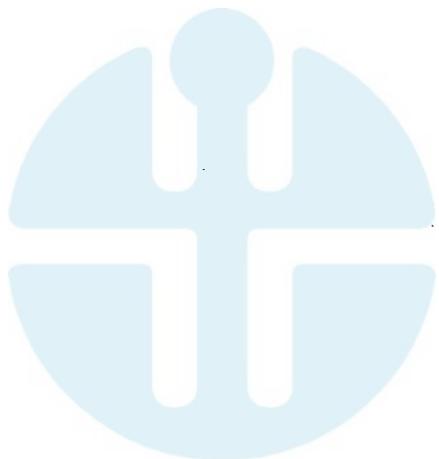
Tabel II-10	Produksi Kayu Hutan dan Hasil Hutan Ikutan Menurut Jenis Produksi Propinsi Jambi Tahun 1995/1996 - 1997/1998	29
Tabel II-11	Kapasitas Produksi Kerajinan Kayu dan Mebel Jambi 92/93 - 97/98	30
Tabel III-1	Jumlah Unit Usaha dan Tenaga Kerja Kerajinan Kayu Pulau Betung 1994-1998	47
Tabel III.2	Jumlah Kios Menurut Ukuran Kecil, Sedang dan Besar di Pulau Betung Tahun 1994 – 1999	49
Tabel III.3	Biaya Produksi (2 minggu)	54
Tabel III.4	Hasil Penjualan	54
Tabel III.5	Jumlah Dana Yang Diberikan Kepada 10 Orang Pengrajin Bulan September 1999 (<i>Cash Outflow</i>) ...	56
Tabel III.6	Rencana Angsuran Pinjaman 10 Orang (<i>Cash Inflow</i>)	57
Tabel III.7	Realisasi Arus Kas Masuk dan Keluar (untuk kelompok II) Bulan November 1999 s/d Februari 2000	58

LIPI

DAFTAR BAGAN

Bagan I-1	Kaitan Ke Belakang Dan Ke Muka Dari Kerajinan Kayu	5
Bagan I-2	Kerangka Pemikiran Pemberdayaan	6
Bagan III-1	Pembagian kerja dan hubungan antara kedua tim ...	41
Bagan III-2	Kerangka Konseptual Pemberdayaan	42



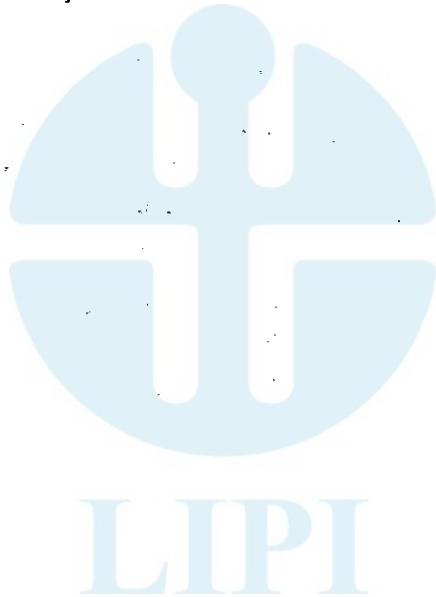


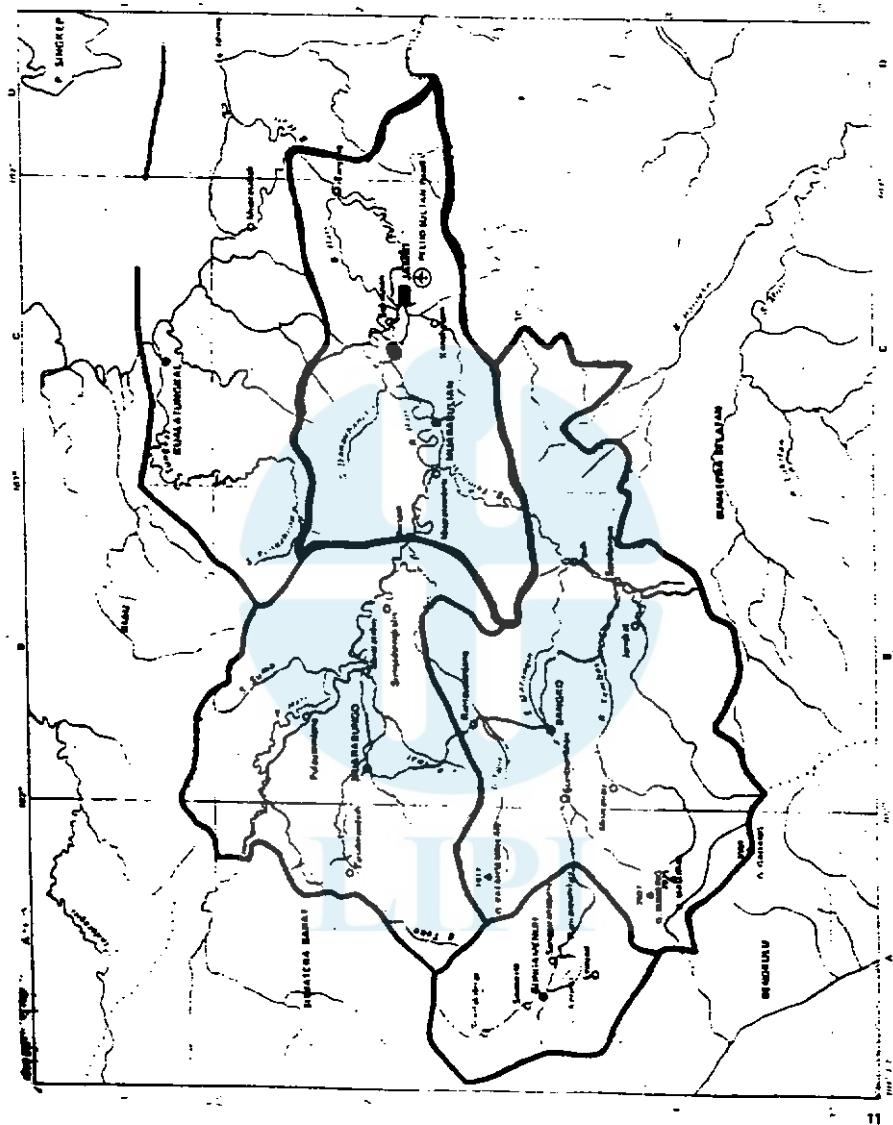
LIPI

ABSTRAK

Berangkat dari hasil analisis bahwa kayu (hutan) merupakan salah satu potensi propinsi ini, fokus kegiatan pemberdayaan ditujukan pada kerajinan kayu rakyat yang memanfaatkan limbah kayu.

Dari hasil analisis ternyata kayu adalah salah satu sektor dimana Indonesia memiliki keunggulan komparatif. Lebih jauh lagi diketahui pula bahwa tidak semua propinsi memiliki hutan yang merupakan sumber bahan baku kayu. Di antara propinsi yang beruntung ini adalah Jambi, oleh karena itu fokus kegiatan pemberdayaan ditujukan pada kerajinan kayu rakyat yang memanfaatkan limbah kayu.







PENDAHULUAN: PEMBERDAYAAN SEBAGAI UPAYA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI

Oleh:

Jusmallani, Januar Batubara dan Hany Nasution

LIPI

Kabupaten Batanghari, Jambi. Makalah pembuka ini terdiri dari beberapa bagian, setelah latar belakang penjelasan selanjutnya adalah mengenai definisi, konsep dan metodologi yang kemudian diikuti oleh kerangka pemikiran pemberdayaan. Bagian selanjutnya memberikan ulasan tentang sektor kehutanan sebagai sumber bahan baku industri perkayuan di propinsi Jambi, untuk kemudian ditutup dengan sistematika laporan.

1.2. Definisi, Konsep dan Metodologi

1.2.1. Definisi dan Konsep

Pemberdayaan yang merupakan terjemahan dari kata *empowerment* (dari akar kata “*to empower*”) menurut kamus bahasa Inggris (Webster dan Oxford) dapat diartikan dua yaitu pertama *to give power or authority to* (memberi kekuasaan atau wewenang pada); kedua *to give ability to or enable* (memberi kemampuan atau kesanggupan). Pengertian yang terakhir inilah yang ditafsirkan dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai pemberdayaan.

Konsep ini lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan Barat, utamanya Eropa. *Empowerment* Eropa modern merupakan aksi emansipasi dan liberalisasi manusia dari totaliterisme keagamaan. Emansipasi dan liberalisasi serta penataan terhadap segala kekuasaan dan penguasaan itulah yang kemudian menjadi substansi dari konsep *empowerment*. Singkatnya masyarakat menginginkan terjadinya proses depowerment dari sistem yang ada (konsep kenegaraan dalam bentuk kerajaan Romawi Suci atau Aliansi-aliansi Suci) dan mengantikannya dengan empowerment dari sistem alternatifnya (konsep negara bangsa) (Pranarka & Moeljoto, 1996).

Berdasarkan penelitian kepustakaan, proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Kecenderungan kedua menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog (Pranarka & Moeljarto, 1996).

Pemberdayaan yang dilaksanakan pada industri kerajinan kayu ini sekaligus memuat dua kecenderungan di atas. Proses yang pertama

dilaksanakan melalui pelatihan, sedangkan proses yang kedua melalui penguliran dana. Kedua kegiatan ini melibatkan secara aktif kelompok masyarakat yang akan diberdayakan sehingga pendekatan yang digunakan dapat digolongkan sebagai *participatory approach*.

Sebagai tambahan dapat dikatakan bahwa pada dasarnya kegiatan pemberdayaan merupakan tanggung jawab kita semua, karena konsep pemberdayaan ini ditemukan hampir dalam semua ajaran agama. Walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit banyak sekali ayat yang menyuruh melaksanakan pemberdayaan sebagaimana layaknya anjuran untuk memerangi kemiskinan. Secara menyeluruh sebenarnya kita diingatkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi lingkungannya. Jadi dengan melaksanakan pemberdayaan sebaik-baiknya, maka bagian dari tanggung jawab pada masyarakat sudah kita tunaiakan.

1.2.2. Metodologi

Untuk metodologi perolehan data, digunakan kombinasi dari pengamatan, wawancara dan daftar pertanyaan. Analisis dilakukan baik terhadap data primer yang diperoleh di lapangan maupun data sekunder yang telah dipublikasikan. Namun demikian, kesulitan ditemukan pula dalam memperoleh data-data pasca krisis yang pada umumnya belum siap dihimpun oleh institusi yang berwenang.

Metode analisis data yang digunakan disini adalah analisis deskriptif baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sesuai dengan data yang diperoleh. Tabulasi silang dan perhitungan seperti *payback-period* digunakan sebagai alat bantu dalam analisis.

1.3. Kerangka Pemikiran

Suatu kegiatan ekonomi dipastikan memiliki kaitan ke belakang (*backward linkage*) dan kaitan ke muka (*forward linkage*). Kaitan ke belakang terdiri dari berbagai aktifitas yang mendahului, misalnya saja untuk kegiatan pertanian, aktifitas ekonomi yang mendahului adalah pengadaan lahan, pupuk, bibit, dan pestisida; untuk kegiatan manufaktur di antara aktifitas ekonomi yang mendahului adalah penyediaan bahan baku, dimana bahan baku ini sangat boleh jadi merupakan output dari aktifitas sebelumnya.

Kaitan ke muka lebih merupakan berbagai upaya agar hasil akhir dari kegiatan ekonomi ini dapat dinikmati oleh masyarakat

pengguna (*consumers*). Kaitan ke muka dan ke belakang dari kerajinan kayu secara sederhana dapat disimak dari bagan I-1.

Akan tetapi kaitan dari suatu kegiatan ekonomi tidak terbatas hanya pada *backward* atau *forward linkage* saja, melainkan terdapat pula *vertical* dan *horizontal linkage*. *Vertical linkage* lebih merupakan suatu terminologi yang menyatukan *forward* dan *backward linkage*; sedangkan *horizontal linkage* lebih kepada pengertian keterkaitan antara mitra yang sejajar. Kemitraan semacam ini akan memberikan manfaat tersendiri, misalnya menggunakan peralatan yang sama, seperti menggunakan unit pengering kayu yang sama untuk kerajinan kayu, atau dalam pertanian jika beberapa petani memiliki penggilingan padi dan menggunakan bersama-sama.

Untuk kasus pemberdayaan ini industri kerajinan kayu tidak akan didekati melalui linkages, melainkan dengan pendekatan *stakeholder*. *Stakeholder* yang dimaksud di sini adalah juga yang dalam terminologi Robbins disebut dengan *strategic constituencies* (Robbins, 1990) atau jika diartikan secara bebas adalah pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam kasus kerajinan kayu rakyat ini daftar *strategic constituencies* termasuk: pemasok bahan baku, lembaga-lembaga pemberi dana, lembaga-lembaga riset yang memberi teknologi, agen-agen pemasaran, pemilik toko dan lain sebagainya. Interaksi yang intens dan saling menguntungkan di antara pihak-pihak ini akan mengembangkan suatu pola kemitraan dimana sinergi yang ditimbulkan akan menghasilkan output yang dapat bersaing pada semua tingkat persaingan¹. Kerangka pemikiran digambarkan dalam bagan I-2.

Selanjutnya bagan menunjukkan bahwa output yang dapat bersaing di pasar global adalah output yang memenuhi standar mutu, biaya dan waktu penyerahan barang (QCD). Tiga indikator keberhasilan ini secara bersama-sama telah sesuai dengan kecenderungan dalam pemasaran yaitu memenuhi kepuasan konsumen, karena melalui kepuasan konsumenlah, *stakeholder* dapat dipuaskan. Selanjutnya dengan output yang memenuhi QCD, diharapkan baik volume penjualan maupun pangsa pasar (*market share*) akan meningkat sehingga pada gilirannya kontribusi pada pendapatan daerahpun akan meningkat.

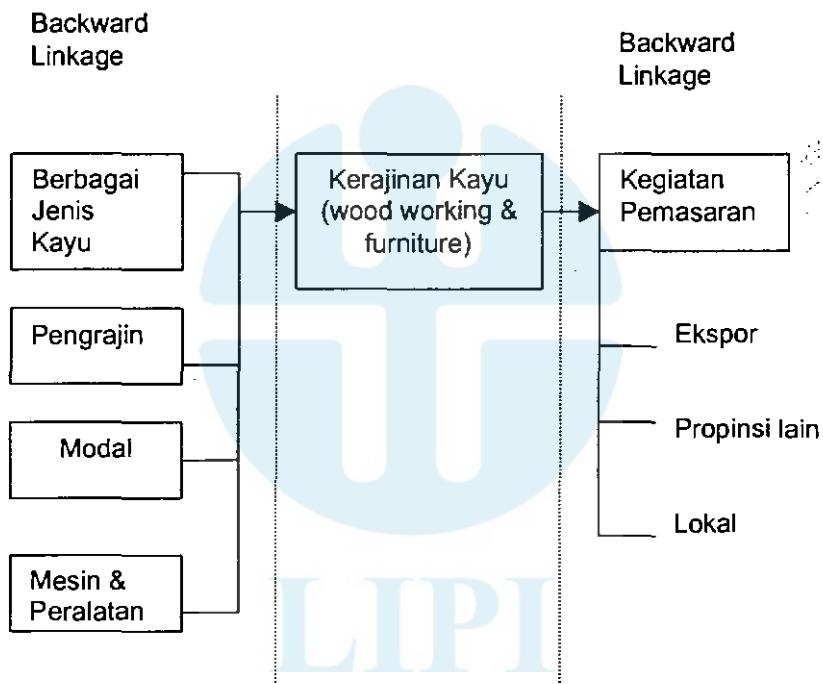
Jadi, pertama dengan memberdayakan industri kerajinan kayu rakyat, kemudian kedua dengan memfasilitasi jaringan kemitraan

¹ Yang dimaksud dengan pada semua tingkat persaingan adalah dalam pasar lokal, pasar domestik maupun pasar global.

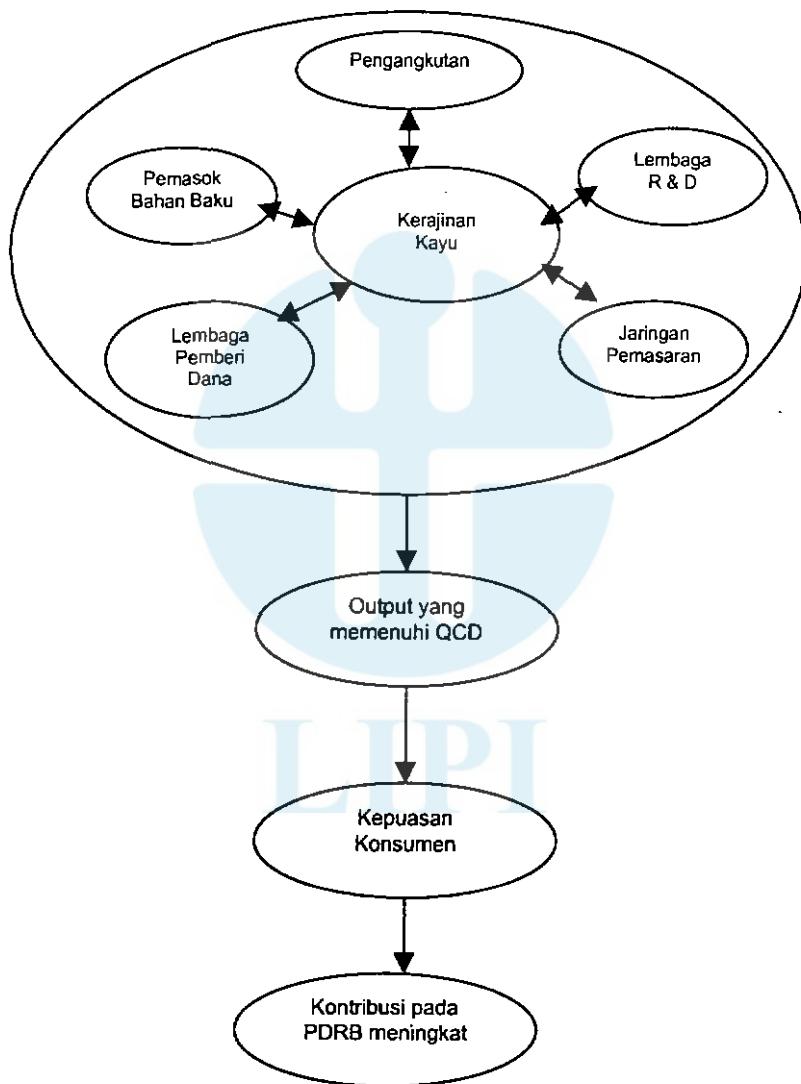
dengan *stakeholder*, diharapkan output yang dihasilkan memenuhi standar QCD. Jika hal ini sudah tercapai, maka hakikat dari pemberdayaan sebagian besarnya telah terpenuhi.

Bagan I-1

Kaitan Ke Belakang Dan Ke Muka Dari Kerajinan Kayu



Bagan I-2
Kerangka Pemikiran Pemberdayaan



1.4. Hutan Sebagai Sumber Bahan Baku Industri Perkayuan

Indonesia memiliki areal hutan paling luas, sekitar 143,5 juta ha². Dari luas tersebut 30,3 juta ha merupakan hutan lindung, 18,7 juta ha hutan konservasi dan 64,4 juta ha merupakan hutan produksi tetap, sisanya, hutan yang disediakan untuk dikonversi. Konversi hutan ini dulunya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan permukiman dan pertanian, namun pada kenyataannya tidak hanya memenuhi dua jenis kebutuhan tersebut tetapi digunakan pula untuk perkebunan, HTI dan pertambangan. Akibatnya kawasan hutan konversi berkurang dari tahun ke tahun. Kawasan hutan secara keseluruhan tahun 1986 sudah berkurang menjadi 121,57 juta ha atau berkurang 15,28 persen.

Dari segi ekologis, hutan menyediakan pengadaan air bersih, menyerap CO₂ dan memproduksi O₂ sedangkan dari segi ekonomi hutan menyediakan produk-produk bermanfaat baik berupa kayu maupun non-kayu. Di samping itu mengacu pada UUD-45 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam adalah milik rakyat, maka seyogyanyalah pengusahaan hutan benar-benar dipantau agar dapat memakmurkan masyarakat.

Hutan mulai ditengok dan dieksplorasi pada akhir dasawarsa 1960-an dengan alasan keterpurukan ekonomi yang memerlukan modal untuk menggerakkannya kembali. Sejak itu dimulailah membagi pengusahaan hutan di kalangan purnawirawan ABRI, setidaknya sejak 1970-an ada sekitar 500 HPH telah beroperasi. Periode 1970-1980 pengusaha HPH masih dapat mengekspor kayu log (bulat). Dalam periode booming ini hutan menjadi salah satu sumber devisa utama. Periode 1980-1990 karena pelarangan ekspor kayu log, mulailah muncul ribuan pabrik sawmill, plywood dan perabotan dari kayu.

Akses publik dalam hal informasi kehutanan dari pemerintah maupun sektor swasta hampir tidak ada. Pembuatan kebijakan tidak transparan dan tidak didasarkan pada informasi akurat, dan jelas mengabaikan masyarakat yang juga memiliki kepentingan terhadap hutan sebagai sumber pangan, pendapatan, pengetahuan dan kebudayaan. Paling tidak terdapat 6.000 spesies tanaman dan hewan yang berasal dari hutan dan digunakan sehari-hari oleh masyarakat untuk pangan, obat-obatan, bahan pewarna dan sebagainya. Di samping itu pengalaman dalam pengelolaan hutan oleh masyarakat juga cenderung diabaikan demikian pula institusi di daerah yang berkepentingan dengan hutan.

² Departemen Kehutanan dan Perkebunan

Keputusan pengelolaan hutan yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah ini tidak didasari pengetahuan tentang daya dukung sumberdaya (Business News, 2000). Di samping itu proses produksi hutan bersifat monolithik yaitu ditekankan hanya pada satu komoditi yaitu kayu dimana hanya negara yang mempunyai hak menguasai. Padahal potensi hutan yang non-kayu, keanekaragaman hayati untuk pertanian termasuk mikroba serta potensi pariwisata dan penelitiannya tidak didayagunakan secara optimum. Reboisasi hanya pada satu spesies tunggal. Hal ini menyalahi prinsip utama ekologi daerah tropik seperti Indonesia yaitu keragaman (Business News). Belum lagi dana reboisasi yang digunakan untuk kepentingan-kepentingan non-kehutanan seperti proyek IPTN.

Sampai Juni 1998, luas hutan yang rusak di kawasan HPH mencapai 16,57 ha. Laju kerusakan hutan di Indonesia berkisar antara 600.000 ha hingga 1,3 juta ha per tahun. Di sisi yang lain, pemerintah menganggap penerimaan devisa dari ekspor produk kayu perlu dipertahankan. Untuk ini pemerintah menganggap konsep hutan tanaman industri (HTI) adalah solusi yang tepat³.

1.4.1 Kawasan Hutan Dalam Propinsi Jambi

Sebagian besar luas daratan Propinsi Jambi saat ini masih didominasi oleh kawasan hutan. Kawasan hutan Jambi terdiri dari hutan produksi, hutan lindung, hutan suaka alam dan hutan konversi. Pengelolaan kawasan hutan antara lain dimanfaatkan untuk pengembangan hutan tanaman industri serta pelepasan kawasan hutan konversi menjadi lahan budidaya pertanian terutama untuk pembuatan lahan perkebunan. Tabel I-1 berikut memberikan gambaran tentang kawasan hutan di Propinsi Jambi.

³ Berbagai kebijakan dalam bidang HTI diantaranya adalah PP No.7/1990 tentang hak penguasaan HTI; Keppres No.29/1990 tentang dana reboisasi (DR); SKB menteri kehutanan dan menteri keuangan No.421/1990 dan no.931/1990

Tabel I-1

Luas Kawasan Hutan (Ha) di Propinsi Jambi Menurut Fungsinya Tahun 1995/1996 – 1997/1998

Jenis Hutan	1995/6	%	1996/7	%	1997/8	%
Hutan produksi	1.429.245	53,57	1.436.200	49,22	1.336.630	52,49
Hutan lindung	181.200	6,79	181.200	6,21	161.650	6,35
Hutan wisata dan suaka alam	602.900	22,60	877.200	30,06	701.100	27,53
Hutan dikonversi	454.466	17,04	423.275	14,51	347.010	13,63
Jumlah	2.667.811	100,00	2.917.875	100,00	2.546.390	100,00

Sumber: Dinas Kehutanan Propinsi Jambi.

Dari tabel di atas kelihatan bahwa luas kawasan hutan produksi menurun dari tahun 1995/1996 - 1997/1998 sebesar 6,48 persen. Anehnya total luas kawasan hutan pada periode tersebut mulanya meningkat dari 2.667.811 ha menjadi 2.917.875 ha, tetapi pada tahun 1997/1998 menurun menjadi 2.546.390 ha. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan hutan tersebut bisa bertambah dan bisa berkurang (mempunyai kaitan dengan Keputusan Menteri Kehutanan).

Keputusan Menteri Kehutanan No. 419/Kpts-II/94 pasal 1 ayat 2, tentang Pedoman Tukar Menukar Kawasan Hutan menyebutkan bahwa: *Tukar menukar kawasan hutan tetap untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan.* Pasal 5 menyebutkan bahwa, pada dasarnya kawasan hutan yang dapat ditukar adalah kawasan hutan tetap yang berfungsi sebagai hutan produksi. Hal inilah yang menyebabkan luas areal itu dapat berubah seperti yang ditunjukkan Tabel I-1 di atas.

Jika ditelusuri perkembangan luas jenis hutan dalam periode 1995/1996 sampai dengan periode 1997/1998, hampir semua areal jenis kawasan hutan menurun, kecuali suaka alam yang menunjukkan peningkatan. Kawasan wisata dan suaka alam meningkat dari 602.900 ha pada periode 1995/1996 menjadi 701.100 ha pada periode 1997/1998 atau meningkat sebesar 16,29%. Sayangnya potensi wisata ini tidak diimbangi dengan promosi yang memadai dalam bidang kepariwisataan.

1.4.2. Perkembangan Industri Hasil Hutan Dan Pertanian

Dibandingkan dengan sektor-sektor ekonomi lainnya, sektor pertanian dan kehutanan Jambi merupakan sektor andalan yang diharapkan mampu menjadi pemasok bahan baku pangan dan industri.

Perkembangan industri hasil pertanian dan kehutanan (IHPK) sampai tahun 1998 dari berbagai indikator dapat dilihat dari Tabel I-2.

Tabel I-2
Perkembangan IHPK 1996-1997

Keterangan	1996	1997	r
Jumlah perusahaan	3.261	3.822	17,20
Tenaga Kerja	37.802	42.315	11,94
Nilai Investasi (Rp.milyar)	8.153,30	8.931,645	9,55
Nilai Produksi (Rp. Milyar)	1.218,636	1.992,340	63,49
Nilai Bahan Baku (Rp. Milyar)	n.a.	1.292,321	
Sentra Industri Kecil HPK	98	101	3,06

Sumber: Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Jambi.

Tabel di atas menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dalam periode 1996-1997, perkembangan terpesat adalah dalam nilai produksi meningkat sebesar 63,49%. Di sisi lain perkembangan investasi dan perkembangan jumlah perusahaan relatif jauh lebih kecil. Hal ini dapat diartikan entri ke dalam industri ini dilakukan oleh usaha-usaha kecil, dan ini dibuktikan dengan pertambahan sentra industri kecil sebanyak 3 sentra. Penyebaran IHPK menurut kabupaten ditunjukkan oleh Tabel I-3 berikut:

Tabel I-3
Keadaan IHPK 1998 Menurut Kabupaten

Kabupaten	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Investasi (Rp. Milyar)	Produksi (Rp. Milyar)	Bahan Baku (Rp. Milyar)
Kodya Jambi	590	6.322	317.925	817.925	861.977
Batanghari	845	16.151	377.182	324.064	190.711
Bungo Tebo	581	2.546	32.206	234.778	192.394
Sarolangun	400	1.550	16.488	16.184	10.242
Bangko	825	14.319	7.685.582	587.542	339.764
Tanjung Jabung Kerinci	581	1.427	2.260	11.855	7.240
Total	3.822	42.315	8.931.645	1.992.340	1.292.321

Sumber: Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Jambi..

Unit usaha IHPK terbanyak ditemukan di Kabupaten Batanghari dengan tenaga kerja yang relatif banyak pula dibandingkan kabupaten lainnya. Tampaknya kontribusi industri hasil pertanian dan kayu cukup berarti, termasuk sektor kerajinan kayu. Angka ini diikuti oleh Kabupaten Tanjung Jabung. Dilihat dari investasi sektor IHPK di

Tanjung Jabung cukup besar, hal ini diduga investasi pada sektor hasil pertanian cukup berarti karena pabrik santan kelapa KARA berada di kabupaten tersebut.

Hal menarik lainnya adalah banyaknya kayu log yang keluar dengan tidak resmi dari hutan. Taksiran beberapa narasumber jumlah ini mencapai 30% dari produksi keseluruhan. Dalam satu tahun terakhir memang terlihat usaha perkayuan yang bertambah banyak di Kabupaten Muara Jambi (kabupaten baru yang tadinya merupakan bagian dari Kabupaten Batanghari).

Dari sisi kelestarian lingkungan hal ini mungkin lebih baik karena dalam *kegiatan pencurian* yang dilakukan masyarakat, mereka tidak menebas habis hutan. Hasil curian inipun ditampung oleh usaha-usaha penggergajian kayu berskala menengah. Barangkali pengusahaan hutan selayaknya ditata ulang dan tidak lagi diberikan pada pengusaha hutan secara besar-besaran, melainkan dialokasikan sedemikian rupa sehingga hasil yang lebih besar dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar.

Walaupun produksi kayu hutan menurun, sebagai gantinya diharapkan hasil kayu Hutan Tanaman Industri sudah dapat dipetik. Bahan baku kayu seperti ini dapat digunakan oleh industri tertentu saja. Seandainya bahan baku hutan kayu tidak diproduksi lagi, industri kerajinan kayu dan mebel akan mengalami kesulitan dalam memperoleh bahan baku.

Dibandingkan dengan Usaha Mebel Kayu Jepara (Cemsed – FE UKSW, Salatiga; 1998: 53). Kekurangan kebutuhan bahan baku dipenuhi dari sumber lain seperti mendatangkan dari Perhutani wilayah lain serta kayu kampung. Kayu kampung kualitasnya lebih rendah sehingga hasil produksi mebel juga akan mengalami penurunan kualitas. Demikian pula halnya dengan Jambi, dimana tanda-tanda bahwa bahan baku kayu dengan kualitas yang baik akan menurun sudah mulai tampak. Kondisi ini perlu dicermati dan diantisipasi lebih awal, karena hilangnya sumber bahan baku menyangkut pula kelangsungan hidup sekian banyak rumah tangga yang berkecimpung di bidang ini. Namun demikian untuk kegiatan pemberdayaan yang lebih banyak memanfaatkan limbah kayu, kegiatan ini masih dapat dihidupkan untuk kemudian dalam perjalannya dicarikan pengembangan ke arah lain, seperti misalnya tikar.

1.5. Penyajian Laporan

Laporan ini terdiri dari empat bab dimana bab satu atau bab Pendahuluan membahas Pemberdayaan sebagai Upaya Mendukung Pemulihan Ekonomi. Bab satu yang merupakan bab pembuka ini juga memberikan ilustrasi tentang hutan sebagai sumber bahan mentah industri kerajinan kayu dan hutan sebagai produsen kayu.

Selanjutnya bab dua mencoba melihat prospek industri kayu dalam kaitannya dengan konsep *comparative advantage*, dimana untuk mengatasi situasi krisis andalan pada *resource-based industry* tampaknya sangat cukup beralasan.

Kegiatan pemberdayaan terhadap industri perkayuan diuraikan secara lugas dalam bab tiga. Hasil dari pengamatan terhadap peserta latihan dan permasalahan yang mereka kemukakan menyebabkan tim peneliti memutuskan pengguliran dana untuk modal kerja. Kegiatan pemberdayaan hari demi hari didelegasikan pada tim pengembangan yang anggota-anggotanya diformalisir sebagai pengurus Yayasan.

Laporan ini kemudian ditutup dengan bab terakhir yang membahas prospek dan evaluasi.



DAFTAR PUSTAKA

Bappeda & BPS (1998) *Informasi Kuantitatif 42 Tahun Propinsi Jambi*.

Biro Pusat Statistik, *Jambi dalam Angka 1995*.

Biro Pusat Statistik, *Jambi dalam Angka 1997*.

Biro Pusat Statistik, 1998, *Batanghari dalam Angka*

Booth, Anne. 1999, *Survey of Recent Development*, Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 35 No.3: 3-38)

Business News, Maret 2000, *Orde Baru tidak Memiliki Visi Strategis dalam Pengelolaan Hutan*.

CEMSED-FE UKSW & PKPEK (1998), *Dampak Krisis Moneter Pada Usaha Mebel Kayu Jepara*, Salatiga.

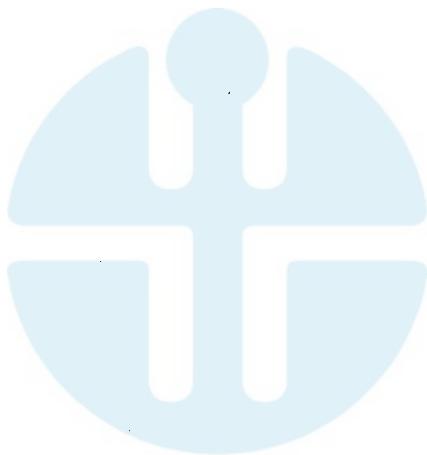
Kadiman, Irawan & Komara Djaja, 1999. *Tinjauan Triwulan Perekonomian Indonesia*, Ekonomis dan Keuangan Indonesia Vol. XLVII No.1: 1-18.

Kopkar Departemen Kehutanan & Mitra Info (1995), *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kehutanan Tahun 1993-1995*, Jakarta.

Pranarka, A.M.W. & Vidhyandika Moejarto, 1996. *Pemberdayaan (Empowerment) dalam Priyono & Pranarka (penyunting): Pemberdayaan. Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta: 44-70.

Priyono, Onny S. dan A.M.W. Pranarka (penyunting), 1996: *Pemberdayaan. Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta.

Robbins, Stephen. P. (1990). *Organization Theory: Structure Designs and Applications* 3rd. ed., Prentice Hall, International.



LIPI

II

PEMANFAATAN KEUNGGULAN KOMPARATIF DAN INDUSTRI PERKAYUAN JAMBI

Oleh:

Hany Nasution dan Joko Suryanto

LIPI

PEMANFAATAN KEUNGGULAN KOMPARATIF DAN INDUSTRI PERKAYUAN JAMBI

Oleh:

Hany Nasution dan Joko Suryanto

2.1. Pendahuluan

Propinsi Jambi didirikan berdasarkan Undang-undang No. 61 tahun 1958, bersamaan dengan pembentukan Propinsi Sumatera Barat dan Propinsi Riau. Batasan geografis propinsi Jambi adalah $0^{\circ} 45'$ sampai $2^{\circ} 45'$ lintang selatan dan antara $101^{\circ} 10'$ sampai $104^{\circ} 55'$ bujur timur. Tiga propinsi yang mengapit propinsi ini adalah Propinsi Riau, Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Sumatera Barat. Luas Propinsi Jambi adalah 53.436 km^2 atau 2.76% dari wilayah Indonesia. Saat laporan ini dibuat Jambi terdiri dari enam kabupaten yaitu Kerinci, Bungo Tebo, Sarolangun Bangko, Batanghari, Tanjung Jabung dan Kodya Jambi. Pemekaran yang terjadi di Jambi adalah penambahan kabupaten baru, pada awalnya Kabupaten Batanghari kemudian menjadi Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muara Jambi.

Jambi adalah satu di antara beberapa daerah Indonesia yang termasuk dalam kategori "aman", bersama dengan Bali dan Batam menjadi tempat pilihan untuk menghindar dari kerusuhan yang terjadi beberapa waktu lalu. Dengan dibukanya jalan Lintas Timur di pulau Sumatera, maka Propinsi Jambi saat ini menjadi salah satu propinsi di Sumatera yang memiliki akses darat yang relatif lancar ke seluruh daerah tingkat II. Perkembangan lainnya yang cukup menarik adalah bahwa propinsi ini untuk pertama kalinya dipimpin oleh gubernur yang berasal dari sektor swasta. Dengan latar belakang seperti ini diharapkan beda persepsi yang sering terjadi diantara birokrat dan swasta dapat dikurangi sehingga akhirnya dua pihak ini tidak lagi saling curiga dan pembangunan daerah dapat lebih ditingkatkan.

Selama Pembangunan Jangka Panjang I periode 1969 - 1993, ekonomi Propinsi Jambi berhasil tumbuh sekitar 7% per tahun dan saat memasuki awal PJP II pada tahun 1994 ekonomi tumbuh lebih tinggi lagi yaitu mencapai 8.17%. Struktur perekonomian Propinsi Jambi sejak

awal perjalannya hingga tahun 1997 didominasi oleh sektor pertanian meskipun kontribusinya dari tahun ke tahun cenderung menurun sebagai akibat meningkatnya peran sektor industri⁴

Namun demikian proses industrialisasi yang terjadi di Propinsi Jambi sebagian masih merupakan sub-ordinat dari industri yang lebih besar yang ada di propinsi lain. Minyak bumi misalnya, meskipun Propinsi Jambi memiliki fasilitas eksplorasi, tetapi pengolahannya masih di Plaju, Sumatera Selatan. Kelapa sawit yang begitu melimpah, sebagian juga diolah di daerah lain. Industri yang sudah cukup mapan baru berkisar pada industri pengolahan hasil-hasil hutan, yang mulai berlangsung sejak tahun 1980-an dan mencapai kemajuan setelah 1990-an.

Ekspor non-migas Jambi (maupun Indonesia) cenderung bergantung pada beberapa komoditi saja, seperti karet dan kayu lapis. Keterbatasan ini mengharuskan kita untuk mencari komoditi eksport potensial lainnya untuk dikembangkan. Untuk mencari komoditi eksport yang potensial, salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan konsep keunggulan komparatif.

2.2. Perkembangan Konsep dalam Perdagangan Internasional

Teori keunggulan komparatif (*comparative advantage*) merupakan konsep dasar bagi teori perdagangan internasional dengan David Ricardo (1817) sebagai pelopornya. Pada dasarnya teori Ricardo merupakan kritik terhadap teori keunggulan absolut (*absolute advantage*) yang dikemukakan oleh Adam Smith (1776).

Prinsip dasar teori keunggulan komparatif sangat sederhana, yaitu jika dua negara memproduksi dua macam barang dalam kondisi perdagangan bebas, maka masing-masing negara akan mengeksport barang yang mempunyai harga relatif lebih murah, dan mengimpor barang lain yang harga relatifnya lebih tinggi. Perbedaan antara harga relatif di masing-masing negara merupakan suatu keunggulan ataupun ketidakunggulan komparatif. Hukum ini pada prinsipnya berlaku juga bagi banyak negara dan banyak komoditi.

Teori Ricardo mengacu pada beberapa asumsi penting, yaitu (Yoffie, 1994): harga ditentukan oleh produktifitas relatif tenaga kerja, bukan ditentukan oleh permintaan; disamping itu pola perdagangan ditentukan sepenuhnya oleh perbedaan teknologi antar negara.

⁴ BPS (1998), 42 Tahun Propinsi Jambi.

Sementara barang yang diproduksi menghadapi pasar global, namun faktor produksi bersaing satu sama lain hanya dalam lingkup nasional.

Komoditi yang memiliki keunggulan komparatif merupakan komoditi yang potensial untuk dieksport. Lebih lanjut teori Ricardo menyatakan bahwa pendapatan ril dari negara yang melakukan perdagangan dapat dimaksimumkan, bila terjadi perdagangan dimana masing-masing negara mengadakan spesialisasi dalam memproduksi komoditi yang memiliki keunggulan komparatif (Yoffie,1994).

Kelemahan konsep keunggulan komparatif Ricardo terletak pada asumsinya yang mengatakan bahwa tenaga kerja merupakan satu-satunya faktor produksi. Pada kenyataannya faktor produksi lainnya juga mempunyai peran yang berarti bagi perdagangan internasional seperti tanah, modal dan sebagainya.

Mengacu kepada pemikiran ini "Heckscher-Ohlin" mengembangkan teori yang memfokuskan pada dua faktor produksi yaitu: tenaga kerja dan modal, sehingga teorinya dikenal dengan *Factor proportions* atau *Factor endowment*. Dengan asumsi bahwa semua negara memiliki teknologi yang sama (berakibat produktifitas tenaga kerja sama), teori ini mendasari pada dua dalil yaitu (Yoffie,1994): (1) bahwa dalam menghasilkan komoditi terdapat perbedaan dalam hal berapa banyak tenaga kerja atau modal yang digunakan; (2) tersedianya tenaga kerja dan modal tidak sama pada tiap negara. Kedua pemikiran dasar tersebut menjadi dasar teori dari model "Heckscher-Ohlin", dimana negara yang memiliki tenaga kerja berlimpah cenderung akan spesialisasi dalam produksi barang-barang yang bersifat padat karya (*labor intensive*). Kelemahan teori ini juga terletak pada asumsinya yaitu bahwa tingkat teknologi di tiap negara sama.

Keakuratan pengujian empiris atas teori Heckscher-Ohlin dilakukan oleh Leontief, yang menemukan bahwa rasio modal/tenaga kerja dari produk ekspor Amerika lebih kecil dibanding rasio modal/tenaga kerja dari produk substitusi impor. Dengan perkataan lain, secara rata-rata ekspor Amerika kurang padat modal dibanding impor Amerika, padahal negara ini merupakan negara yang relatif padat modal. Temuan ini pada prinsipnya bertentangan dengan teori Heckscher-Ohlin (Yoffie,1994) sehingga temuan Leontief ini menjadi terkenal sebagai *Leontief Paradox*. Lebih jauh temuan ini mendorong timbulnya beberapa pendekatan alternatif untuk memahami sumber-sumber keunggulan bersaing.

Dari beberapa pengujian yang dilakukan terhadap teori Heckscher-Ohlin, nampaknya model yang cenderung tepat untuk

menjelaskan perdagangan internasional adalah teori klasik Ricardo. Teori Ricardo menegaskan bahwa perdagangan yang terjadi antar negara lebih banyak disebabkan oleh karena adanya perbedaan dalam teknologi, dibandingkan dengan perbedaan dalam sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing negara.

Konsep keunggulan komparatif ini kemudian diikuti oleh konsep keunggulan kompetitif (*competitive advantage*). Kedua konsep ini pada prinsipnya tidak seutuhnya independen, karena keduanya merupakan interaksi antara satu sama lain untuk membentuk strategi menembus pasar internasional oleh perusahaan. Dengan kata lain, strategi perusahaan multinasional umumnya dirancang mengikuti pola dimana kekuatan kompetitif perusahaan (dalam hal ini keunggulan kompetitif) memberikan informasi tentang lingkungan domestik dan internasional (dalam hal ini keunggulan komparatif). Matriks keunggulan komparatif dan kompetitif dapat dilihat pada Tabel II-1, dimana matriks dibagi antara dimensi keunggulan komparatif antar negara, dan keunggulan kompetitif perusahaan.

Tabel II-1
Matrix of Comparative and Competitive Advantage

		Competitive Advantages of Firms	
		Strong	Weak
Comparative Advantage Countries	Strong	(1) Both competitive and comparative advantage are strong – International competitiveness is sustainable	(3) Competitive advantage are weak - strong comparative advantage are required to compensate for competitive position globally
	Weak	(2) Comparative advantages are weak - strong competitive advantage are necessary to maintain the industry to compete with global rivals.	(4) Both comparative and competitive advantage are weak - competing globally is unsustainable

Sumber: Deng, American Business Review, June 1998, p.23.

Kuadran 1 adalah kondisi yang paling diinginkan dimana persaingan internasional diyakini dapat dimenangkan, mengingat keunggulan kompetitif dan komparatif terjadi bersamaan. Kuadran 2 menunjukkan bahwa negara yang bersangkutan lemah dalam

keunggulan komparatif dari negara lain, untuk ini perusahaan dapat mengkompensirnya melalui keunggulan kompetitif yang dimilikinya. Situasi yang mirip terjadi pada kuadran 3, dimana industri menderita karena lemahnya keunggulan kompetitif, namun dengan adanya keunggulan komparatif maka posisi untuk bersaing di pasar global dapat dipertahankan. Kuadran 4 adalah kondisi yang tidak memiliki kedua jenis keunggulan, sehingga pada tingkat mikro perlu perubahan yang mendasar bagi perusahaan tersebut (Deng, 1998).

Selanjutnya dalam mengukur keunggulan komparatif antar negara, ada beberapa metode yang dapat digunakan, salah satunya adalah Metode *Revealed Comparative Advantage* (RCA) yang dirintis oleh Bela Balassa. Metode ini mengukur kinerja ekspor suatu komoditi dari suatu negara dengan mengevaluasi peranan ekspor komoditi tertentu dalam ekspor total suatu negara dibandingkan dengan pangsa komoditi tertentu (Balassa,1989). Metode ini pada dasarnya mengkuantifisir keunggulan komparatif yang dimiliki suatu negara, sehingga di dalam suatu perdagangan internasional derajat keunggulan komparatif berbagai macam barang dapat dihitung.

Pertimbangan dasar dari metode RCA bahwa pola perdagangan dari komoditi yang ada mencerminkan biaya relatif, sekaligus menggambarkan perbedaan-perbedaan yang ada dalam faktor-faktor non harga (Ballasa,1989). Jika angka indeks RCA lebih besar dari satu ($RCA > 1$) maka negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, sedangkan jika angka indeks RCA lebih kecil dari satu ($RCA < 1$) maka negara tersebut tidak memiliki keunggulan komparatif.

2.3. Hasil Kajian Terhadap Komoditi Ekspor Non-Migas Indonesia.

Indonesia sebagai salah satu negara di Asia, sampai dengan tahun 1996 mempunyai potensi untuk menjadi salah satu negara yang ikut memberi warna bagi kecenderungan perekonomian dunia, khususnya di kalangan Asia Tenggara. Namun sejak terjadinya krisis ekonomi yang melanda beberapa negara Asia sampai saat ini, kondisi perdagangan internasional Indonesia nampaknya akan mengalami penurunan.

Dimulai pada dekade 80-an perekonomian Indonesia mengalami pergeseran komoditi ekspor, yang sebelumnya hanya mengandalkan sektor minyak dan gas bumi (migas). Turunnya harga minyak pada periode tersebut memberi dampak yang cukup berarti bagi perekonomian Indonesia. Kondisi ini merupakan pengalaman yang berharga bagi Indonesia untuk tidak bergantung hanya kepada satu

komoditi saja. Indonesia dituntut untuk mencari alternatif komoditi ekspor lain selain migas.

Produksi sektor industri manufaktur yang dapat diekspor masih sangat terbatas, sehingga perlu dikaji komoditi manufaktur lainnya yang mempunyai potensi untuk diekspor. Dalam hal ini, keunggulan bersaing merupakan strategi untuk dapat menembus pasar global melalui ekspor, dimana komoditi ekspor difokuskan hanya pada beberapa komoditi yang mempunyai keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dibandingkan negara-negara lain. Disini strategi keunggulan komparatif bertujuan agar keuntungan yang didapat dari ekspor dapat dimaksimumkan.

Sebelum melanjutkan kajian ini ada baiknya kondisi Asia Pasifik diuraikan terlebih dulu. Sampai dengan sebelum terjadinya krisis ekonomi yang melanda sebagian negara Asia, pertumbuhan ekonomi Asia Pasifik relatif cepat dibanding negara-negara di kawasan lain dunia, dimana pertumbuhan yang dialami negara industri baru (NICs) Asia menduduki posisi tertinggi untuk kemudian disusul oleh negara-negara ASEAN. Hal yang menarik dari perdagangan di kawasan Asia Pasifik adalah konvergensi dalam keseragaman jenis barang ekspor yang berasal dari kawasan tersebut. Pola perdagangan yang mengarah pada ekspor hasil manufaktur menjadi semacam kriteria standar (Azis, 1990).

Di kawasan Asia Pasifik terjadi pembagian kerja yang berubah secara dinamis, yang ditandai oleh perdagangan barang manufaktur antara sesama negara industri yang umumnya berada pada tahap pembangunan yang relatif sama, dan dengan latar belakang kebudayaan yang sama. Pembagian kerja internasional ini telah menciptakan suatu hubungan Utara-Selatan. Saburo Okita menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pola pembagian kerja di kawasan Asia Pasifik, dengan memberikan bobot yang hanya bersifat indikatif (Soesastro, 1992). Negara-negara ASEAN memiliki potensi sumber alam dan tenaga kerja yang relatif paling banyak dibanding kelompok negara lainnya, hal ini ditunjukkan dengan bobot 3 pada Tabel II-2.

Tabel II-2
Pembagian Kerja Antara Negara-Negara di Asia-Pasifik

Negara	Pasar	Sumber Alam	Modal	Barang Modal	Teknologi	Tenaga Kerja
Amerika Serikat	4	3	4	3	4	1
Jepang	3	1	4	4	4	1
Australia dan Selandia Baru	2	3	1	1	2	1
ANICs	2	1	1	2	2	2
ASEAN	2	3	1	1	1	3
Cina	2	2	1	1	1	4

Sumber: Saburo Okita, dikutip dari Analisis CSIS, 1992, hal. 275.

Catatan: Angka menunjukkan bobot, dari terendah (1) ke tertinggi (4).

Dinamika ekonomi di kawasan Asia Pasifik ditandai oleh perubahan keunggulan komparatif yang terlihat dari perubahan struktur perdagangan negara-negara di kawasan itu serta perdagangan intra-kawasan sendiri. Perkembangan yang sangat mencolok adalah meningkatnya ekspor barang manufaktur, yang tampaknya menjadi penggerak pertumbuhan utama bagi negara-negara berkembang di kawasan tersebut. Perubahan keunggulan komparatif di Asia-Pasifik dapat dilihat antara lain dari perubahan indeks RCA (lihat Tabel II-3).

Tabel II-3

Perkembangan Indeks RCA Negara-negara di Kawasan Asia-Pasifik

Sektor Industri	Tahun	Jpg	Kor	Htg	Twn	Sin	Ind	Mls	Fip	Thai
- Padat Karya	1985	0,89	4,18	5,74	5,58	0,72	0,45	0,56	0,67	1,89
- Padat Tenaga	1985	2,10	1,84	0,87	0,78	0,43	-	0,04	0,02	0,14
- Terdiri	1985	1,50	0,53	0,44	0,48	0,59	0,24	0,40	0,42	0,23
- Padat Modal	1985	2,08	1,18	1,45	1,44	1,19	0,05	1,38	0,78	0,54
- Padat Teknologi										

Sumber: Analisis CSIS, 1992-3, hal.278

Tabel menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki keunggulan komparatif di seluruh sektor industri yang diindikasikan dengan rata-rata nilai indeks RCA yang relatif kecil, sekalipun demikian pada tahun 1987-1989 Indonesia mengalami kenaikan ekspor hasil industri dengan orientasi tenaga kerja berketerampilan rendah (*unskilled labor intensive = ULI*). Hal ini ditunjukkan dengan kenaikan yang relatif tinggi dalam ekspor tekstil, pakaian jadi, produk kayu, dan sepatu karet dibandingkan dengan kelompok komoditi lainnya (Azis, 1990).

Untuk mengetahui apakah memang komoditi-komoditi tersebut memiliki keunggulan komparatif, mengingat nilai ekspor meningkat

terus sampai akhir tahun 1989, beberapa penelitian telah dilakukan untuk menganalisisnya, diantaranya yang dilakukan oleh Pattisahusiwa (1991) dan LPEM (1992).

Penelitian Pattisahusiwa (1991) menunjukkan bahwa pola keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia cenderung mengarah pada pola keunggulan "sebenarnya", dalam arti keunggulan komparatif dimiliki oleh sektor industri yang menggunakan faktor produksi yang relatif berlimpah, yaitu *unskilled labor intensive*. Dengan data tahun 1975-1987 teridentifikasi industri-industri yang mempunyai indeks RCA tinggi, yaitu sektor industri *wood product, wearing apparel, tekstil, leather and products, non metal products, glass & products, iron & steel*.

Sektor-sektor industri tersebut merupakan sektor industri yang bersifat *unskilled labor intensive*, kecuali sektor *leather and product, non metal products*, merupakan *resource intensive*, dan *iron & steel* merupakan *human capital intensive*. Jadi dapatlah disimpulkan bahwa pola keunggulan komparatif Indonesia cenderung pada industri yang *unskilled labor intensive* dan *resource intensive*. Walaupun struktur pertumbuhan pola keunggulan komparatif Indonesia sejak tahun 1986 menunjukkan penurunan RCA dari industri yang *unskilled labor intensive*, namun karena penurunannya relatif kecil, maka proporsi industri *unskilled labor intensive* masih relatif lebih besar dibanding industri lainnya.

Hasil penelitian Pattisahusiwa (1991) nampaknya ditunjang oleh hasil penelitian LPEM (1992), yang menunjukkan bahwa komoditi yang memiliki keunggulan komparatif adalah sektor industri *unskilled labor intensive*, dan merupakan jumlah terbanyak. Dari 40 kelompok komoditi yang memiliki keunggulan komparatif dengan data tahun 1980-1989, sebanyak 15 industri adalah kelompok komoditi *unskilled labor intensive*. Urutan kedua adalah kelompok komoditi *agricultural resource intensive*.

Komposisi ekspor Indonesia tahun 1996 memberikan gambaran yang lebih menggembirakan, karena sudah didominasi oleh komoditi manufaktur, khususnya tekstil dan kayu lapis (Tabel II-4). Walaupun di satu segi data tersebut merupakan hal yang positif bagi ekspor Indonesia, namun secara rata-rata masih di bawah negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia dan Thailand.

Berdasarkan pemikiran diatas, Indonesia dituntut untuk memperkuat industri manufaktur (selain tekstil dan kayu lapis), agar dapat lebih berperan dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu nampaknya masih jauh perjalanan yang harus dilakukan oleh

Indonesia untuk dapat bermain aktif dan berkesinambungan di pasar Internasional.

Tabel II-4

**Komposisi Ekspor Tahun 1996
(Persentase Relatif Terhadap Total Ekspor)**

Komoditi	Indonesia	Malaysia	Phillipines	Thailand
Komoditi Primer	8.0	3.9	6.8	16.5
Bahan Mentah	36.1	19.2	3.9	0.7
Minyak dan Gas	23.1	11.5	1.5	0.0
Industri Manufaktur	55.1	75.8	55.1	80.4
Tekstil dan Garmen	13.1	4.8	12.2	12.2
Elektronik	2.8	58.9	40.0	29.0
Kayu Lapis dan Karet	16.9	3.3	2.0	1.5
Lain-lain	0.8	1.1	34.2	2.4
Total	52.1	80.2	20.5	60.6

Sumber: J.P.Morgan, *Emerging Markets Data Watch*, 11 Juli 1997
(Dikutip dari The Indonesian Quarterly, XXV/3, hal.216).

Berpijak dari kenyataan bahwa kayu masih merupakan penghasil ekspor utama, maka uraian selanjutnya akan dikaitkan pada industri perkayuan Jambi. Seperti diketahui Jambi masih didominasi oleh hutan sehingga dapatlah dikatakan bahwa sumber bahan baku kayu antara lain berasal dari propinsi ini.

2.4 Industri Perkayuan Propinsi Jambi

2.4.1 Ekspor Propinsi Jambi

Dengan luas kawasan hutan sekitar 214 juta hektar dan luas lahan sawah maupun lahan kering mencapai 665 ribu hektar, Jambi menyimpan potensi perkebunan dan kehutanan yang sangat besar. Selain kayu, Jambi mempunyai berbagai komoditi perkebunan yang potensial, seperti karet dan kelapa sawit, yang ketiganya merupakan primadona ekspor. Di samping itu tanaman perkebunan lainnya seperti kopi, dan biji pinang juga merupakan komoditi ekspor yang juga penting.

Negara tujuan utama ekspor dari propinsi Jambi adalah Jepang, Cina, Korea, Singapura, Amerika Serikat dan Jerman. Data

tahun 1997 menunjukkan bahwa Jepang merupakan negara tujuan ekspor terbesar yaitu sebesar 24,16%, kemudian diikuti oleh Cina sebesar 21,55%, Amerika Serikat 17,23%, Korea 6,76%. Singapura 3,43% dan Jerman 1,25% (Tabel II-5).

Tabel II-5

Ekspor Jambi Menurut Negara Tujuan 1993-1997 (000 dollar)

Negara	1993	1994	1995	1996	1997
Jepang	18.380	70.506	85.484	140.886	123.124
China	2.476	69.373	98.174	78.762	109.828
Amerika Serikat	8.385	53.009	104.683	102.827	87.808
Korea Selatan	50	66.718	84.129	80.039	34.468
Singapura	10.598	24.999	20.104	18.638	17.456
Jerman	1.765	8.754	7.128	11.459	6.374
Lainnya	310.429	157.950	160.762	142.166	130.488
Total Ekspor	352.083	451.309	560.464	574.777	509.546

Sumber: Profil Perdagangan Luar Negeri Propinsi Jambi 1993-1997

Ekspor propinsi Jambi ke negara-negara tujuan dilakukan melalui laut dan udara, sehingga ketersediaan pelabuhan laut dan bandar udara mempunyai peran penting dalam perdagangan internasional. Sebagian besar komoditi utama propinsi Jambi diekspor melalui pelabuhan Jambi, dimana pada tahun 1997 mencapai angka 41,53% dari seluruh nilai ekspor. (Lampiran-1) Pelabuhan Jambi merupakan pelabuhan utama di samping pelabuhan-pelabuhan lainnya seperti Muara Sabak dan pelabuhan Kuala Tungkal.

Jika dilihat dari ekspor nasional, kontribusi ekspor propinsi Jambi relatif kecil (lampiran-2), namun demikian kontribusi ekspor kayu Jambi terhadap ekspor kayu nasional relatif cukup berarti. Selanjutnya jika dikaji komposisi ekspor Jambi dengan membandingkan sektor pertanian dan sektor industri terlihat bahwadalam periode tahun 1993-1997 hasil industri mendominasi pemasukan devisa, yaitu meliputi 99% dari seluruh devisa (Tabel II-6).

Tabel II-6
Total Ekspor Propinsi Jambi Tahun 1993-1997 (000)

Tahun	Ekspor		Total Ekspor
	Hasil Pertanian	Hasil Industri	
1993	42.700	309.381	352.081
1994	3.647	447.661	451.308
1995	4.170	556.443	560.466
1996	2.334	572.443	574.777
1997	3.203	506.343	509.546

Sumber: Profil Perdagangan Luar Negeri Propinsi Jambi 1993-1997

Rincian lebih jauh hasil ekspor ini dapat dilihat dalam tabel II-7 dimana ternyata komoditi yang memberikan kontribusi terbesar pada sektor industri ini adalah kayu lapis dan kayu olahan lainnya (Tabel II-7).

Tabel II-7
Perkembangan Nilai Ekspor Propinsi Jambi Menurut Sektor
Tahun 1993-1997 (US \$)

Sektor/Jenis Barang	1993	1994	1995	1996	1997
Sektor Pertanian	2.149.450	3.647.421	4.170.663	2.333.848	3.203.040
- Kopi	336.707	71.875	28.229	110.342	958.336
- Karet	265.961	142.984	68.036	231.702	482.141
- Udang	1.070.478	1.594.089	1.754.938	1.339.278	1.380.242
- Sayur-sayuran	-	10.733	27.624	2.350	-
- Buah-buahan	-	150.925	228.301	372.219	32.391
- Ikan dan lainnya	83.696	93.221	174.432	6.691	44.284
- Biji Coklat	-	-	3.029	59.770	-
- Lainnya	392.608	1.583.584	1.886.074	211.446	305.646
Sektor Industri	349.934.177	447.661.669	556.296.444	572.443.977	506.343.108
- Makanan Olahan	667.308	158.446	273.598	290.107	31.552
- Karet Olahan	79.984.381	101.420.463	140.302.883	133.788.265	109.671.854
- Kayu Gergajian	18.417.206	7.143.016	10.246.801	26.827.147	22.996.149
- Kayu Lapis & Kayu Olahan Lainnya	249.870.319	329.801.538	335.245.286	365.143.151	352.846.959
- Kertas/Pulp	40.550	7.493.942	67.940.676	44.405.850	12.413.799
- Furniture	881.102	1.320.182	1.920.088	1.599.941	997.648
- Lainnya	73.311	324.082	367.112	389.516	7.385.147
Jumlah	352.083.627	451.309.090	560.467.107	574.777.775	509.546.148

Sumber: Profil Perdagangan Luar Negeri Propinsi Jambi 1993-1997

Secara umum ekspor propinsi Jambi mengalami peningkatan yang cukup berarti selama tahun 1993-1996, yaitu sebesar 17,75% rata-rata per tahun. Namun pada tahun 1997 mengalami penurunan dibandingkan dengan nilai ekspor tahun 1996 yaitu negatif 11,35%,

dimana pada tahun 1996 nilai ekspor propinsi Jambi sebesar US\$ 574.777 ribu tahun 1997 turun menjadi US\$ 509.546 ribu. Penurunan ini pada dasarnya diakibatkan karena penurunan ekspor kayu yang selama ini menjadi primadona ekspor propinsi Jambi. Pasar tradisional kayu lapis seperti Korea, Jepang, Taiwan, dan Cina tidak bergairah sebagai akibat sektor properti di negara-negara tersebut sedang mengalami stagnan, karena pembiayaan kredit bank terhadap sektor ini diperketat. Di samping itu kebakaran hutan yang melanda beberapa kawasan di propinsi Jambi turut mempengaruhi produksi kayu.

Mengingat komoditi utama pemberi kontribusi terbesar pada sektor ini adalah kayu lapis dan kayu olahan lainnya, maka hal ini menunjukkan bahwa industri kayu di Jambi mempunyai potensi strategis untuk dikembangkan. Diharapkan dengan mengembangkan kemampuan kompetitif yang tampaknya masih lemah maka pada saatnya sektor ini akan mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan ekspor non-migas Indonesia.

Dengan menggunakan pendekatan *matrix of comparative and competitive advantage* diatas dapat dikatakan industri kayu di Jambi berada pada kuadran 3, dimana hasil kerajinan kayu masih kurang memiliki keunggulan kompetitif walaupun dari sisi khas berupa model, sedangkan bahan baku dan tenaga kerja (keunggulan komparatif) secara relatif dapat dikatakan bersaing.

2.4.2. Potensi dan Prospek Industri Kayu di Jambi

Komoditi ekspor non-migas utama propinsi Jambi sampai dengan tahun 1998/1999 masih terdiri dari kayu dan karet. Sekalipun dalam dua tahun terakhir nilai ekspor dua komoditi tersebut menurun, namun demikian pangsa nilai ekspor kayu sampai saat ini masih mendominasi pangsa total nilai ekspor Jambi. Sedangkan karet menyumbangkan nilai ekspor terbesar kedua setelah kayu.

Nilai ekspor kayu selama empat tahun terakhir mencapai sekitar 9% dari ekspor kayu nasional, sedangkan ekspor karet Jambi sekitar 7% dari ekspor karet nasional. Pangsa ekspor kayu Jambi terhadap ekspor kayu nasional pada tahun 1998 mencapai 9,11%, relatif lebih kecil dibandingkan dengan pangsaanya pada tahun 1997 (9,46%) (Tabel II-8). Pada tahun 1998/1999 nilai ekspor kayu turun disebabkan karena terjadinya penurunan volume ekspor. Penurunan volume ekspor diduga disebabkan karena berbagai faktor, antara lain: turunnya pasokan bahan baku sebagai akibat dari berbagai kendala seperti kebakaran hutan. Di lain pihak nampaknya permintaan pasar tidak merupakan kendala, karena pada tahun tersebut harga pasar

rata-rata komoditi kayu relatif lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel II-8

Nilai dan Pangsa Ekspor Kayu dan Karet Propinsi Jambi Terhadap Nasional
(Nominal dalam Ribu US\$)

Tahun	Ekspor Kayu			Ekspor Karet		
	Jambi	Nasional	%	Jambi	Nasional	%
1995	310.352	3.610.824	8,60	149.822	1.986.198	7,5
1996	332.252	3.680.894	8,75	147.049	1.893.538	7,8
1997	339.624	3.589.226	9,46	107.977	1.505.101	7,2
1998	219.198	2.405.051	9,11	62.931	1.009.542	6,2

Sumber: Laporan Bank Indonesia, Jambi, 1999.

Walaupun kontribusi kayu terhadap nilai ekspor Jambi pada tahun 1998/1999 mengalami penurunan, namun pada dasarnya kayu masih mendominasi nilai ekspor Jambi pada tahun tersebut. Dengan perkataan lain kayu masih merupakan komoditi ekspor utama propinsi Jambi. Jika dilihat dari jenis kayu olahan yang diekspor, umumnya hampir semua ekspor kayu tersebut merupakan jenis kayu lapis (*plywood*). Di samping itu terdapat pula ekspor berbagai macam hasil olahan kayu lain, serta kayu gergajian, walaupun dengan pangsa yang relatif lebih kecil dari kayu lapis. Pada tahun 1997/1998 dan 1998/1999 nilai ekspor jenis kayu lapis mencapai sekitar 80%-90% dari total nilai ekspor kayu (Tabel II-9).

Tabel II-9

Komposisi Jenis Ekspor Kayu Jambi
(Nilai dalam juta USD)

Jenis Ekspor Kayu	Tahun 1997/1998		Tahun 1998/1999	
	Nilai	%	Nilai	%
Kayu lapis (<i>plywood</i>)	297,7	85,9	206,3	98,7
Kayu gergajian	10,1	2,9	2,3	1,1
Kayu olahan lainnya	38,8	11,2	0,3	0,2

Hasil produksi kayu hutan dan hasil hutan ikutan menurut jenis produksi di Propinsi Jambi terdiri dari berbagai jenis yaitu kayu bulat, kayu gergajian, plywood, veneer, block board, pensil slate, solid timber door, particle board, wood working, tea box, wooden sheet, hasil olahan lainnya, berbagai jenis getah dan berbagai jenis rotan.

Dari hasil hutan yang berbentuk kayu, hasil produksi yang terbesar adalah kayu bulat yaitu pada tahun 1995/1996 sebesar 34,97%, tahun 1996/1997 sebesar 25,98% dan tahun 1997/1998 sebesar 28,43%. Dari tabel II-10 tersebut terlihat bahwa hasil produksi yang menggunakan bahan baku kayu yang kedua terbesar adalah plywood kemudian yang ketiga adalah olahan lainnya. Kayu olahan lainnya ini cukup memegang peranan penting karena pada tahun 1995/1996 kontribusinya sudah menunjukkan angka 24,82%, kemudian pada tahun 1996/1997 naik menjadi 27,00% dan pada tahun 1997/1998 naik lagi menjadi 30,58%. Hal ini menunjukkan peningkatan, sekalipun pertengahan 1997 krisis ekonomi telah dimulai dan sekaligus pula membuktikan bahwa sektor yang berbasis sumberdaya alam umumnya dapat bertahan.

Tabel II-10
Produksi Kayu Hutan dan Hasil Hutan Ikutan Menurut Jenis Produksi Propinsi Jambi
Tahun 1995/1996 – 1997/1998 (dalam m³)

Jenis Kayu	1995/1996	%	1996/1997	%	1997/1998	%
Kayu bulat	918.31,80	34,97	662.353,15	25,98	720.569,55	28,43
Kayu gergajian	203.699,35	7,76	264.659,89	10,38	201.973,49	7,97
Plywood	703.614,35	26,79	726.971,47	28,52	683.974,47	27,00
Block board	83.498,50	3,18	97.773,52	3,84	85.781,05	3,38
Wood working	65.160,68	2,48	86.251,75	3,38	66.867,81	2,64
Olahan lainnya	651.703,22	24,82	711.266,29	27,90	774.959,58	30,58
Jumlah	2.625.986,84	100,00	2.549.276,07	100,00	2.534.125,95	100,00

Sumber: Dinas Kehutanan Propinsi Jambi.

Tabel di atas tidak menunjukkan seluruh hasil produksi yang telah disebutkan sebelumnya, karena memang veneer, solid timber door, tea-box dan wooden sheet angkanya tidak tercatat. Dalam industri olahan lainnya sebenarnya termasuk industri kerajinan kayu yang juga berkembang di Jambi.⁵ Perkembangan kayu olahan lainnya ini pada Pelita IV menunjukkan angka 91.248.812 m³, kemudian pada Pelita V menunjukkan angka 364.741.380 m³, dan pada Pelita VI 945.246.360 m³. Peningkatan ini dalam persentasenya adalah berturut-turut: 3.34%; 9.08% dan 18.09%.

Jumlah industri kayu di Jambi tahun 1994 sebanyak 83 meningkat menjadi 92 tahun 1995 tetapi pada tahun 1996 dan 1997 menurun masing-masing menjadi 85 dan 84. Artinya terjadi penurunan industri kayu yang mungkin disebabkan oleh hasil produksinya tidak laku dijual. Dalam kondisi krisis moneter, dengan nilai tukar rupiah yang menurun, seharusnya ekspor sangat menguntungkan. Akan tetapi dalam situasi yang lalu, apa yang terjadi adalah krisis kepercayaan bank luar negeri terhadap bank-bank di Indonesia, sehingga transaksi perdagangan pun agak terganggu. Pada masa itu penjualan lebih difokuskan di dalam negeri, sedangkan masyarakat dalam negeri secara merata mengalami penurunan daya beli.

Industri kerajinan kayu yang merupakan objek pemberdayaan tim peneliti mengalami peningkatan kapasitas yang cukup berarti baik untuk kerajinan kayu ,maupun untuk mebel yang disajikan dalam Tabel II-11 Kenaikan ini tampaknya terus terjadi sekalipun melalui periode krisis.

Tabel II-11

Kapasitas Produksi Kerajinan Kayu dan Mebel Jambi 92/93 – 97/98
(m³)

Tahun	Kapasitas Produksi Kerajinan Kayu	Mebel
92/93	3.217.000	2.675
93/94	4.263.060	3.567
94/95	4.770.490	3.764
95/96	5.270.330	3.941
96/97	5.868.925	3.998
97/98	6.018.370	4.034

Sumber: Deperindag

⁵ Mengenai perkembangan industri kerajinan kayu di Jambi dikemukakan salah satu industri kerajinan kayu yang menghasilkan meja, kursi, asbak dan sebagainya dengan lokasi Desa Pulau Betung di Kabupaten Batanghari, tepatnya di jalan antara Kota Jambi dengan Kota Muarabulian dijelaskan pada bab tersendiri.

Apabila Tabel II-11 dikaitkan dengan produksi kayu hutan, maka kerajinan kayu dan mebel termasuk dalam “olahan lainnya” dan jumlah produksinya meningkat terus dari tahun 1995/1996 ke tahun 1997/1998 (rata-rata setiap tahun diatas 20%). Produksi lainnya menurun termasuk produksi kayu bulat. Hal inilah yang merupakan masalah yang akan dihadapi oleh pengusaha yang menggunakan bahan baku kayu hutan di Jambi.

Walaupun produksi kayu hutan menurun, sebagai gantinya diharapkan hasil kayu Hutan Tanaman Industri sudah dapat dipetik. Bahan baku kayu seperti ini dapat digunakan oleh industri tertentu saja. Seandainya bahan baku hutan kayu tidak diproduksi lagi, industri kerajinan kayu dan mebel akan mengalami kesulitan dalam memperoleh bahan baku.

2.5. Penutup

Mengacu pada beberapa penelitian yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan konsep keunggulan komparatif, dapat disimpulkan bahwa Indonesia (termasuk Jambi) mempunyai keunggulan komparatif untuk industri manufaktur yang bersifat *unskilled labor intensive*. Dengan sumber daya alam yang melimpah dan kawasan hutan yang luas, maka industri kayu di propinsi ini mempunyai prospek yang potensial untuk dikembangkan menjadi industri yang mempunyai keunggulan komparatif. Sudah saatnya industri perkayuan ini dikelola dengan baik dapat meningkatkan peranannya dalam perdagangan internasional.

Perdagangan internasional merupakan kegiatan yang sudah dikenal sejak dulu kala, dan terus mengalami evolusi sampai saat ini. Dua dekade belakangan ini perekonomian dunia mengalami perubahan pesat dan mendasar. Indonesia sebagai suatu negara yang menganut sistem terbuka, tidak dapat lepas dari pengaruh gerak dan dinamika perekonomian dunia.

Sampai dekade 70-an dimana harga minyak mengalami peningkatan, maka minyak dan gas merupakan primadona ekspor bagi Indonesia. Namun memasuki dekade 80-an, Indonesia tidak dapat lagi menggantungkan penghasilan devisa hanya dari migas semata. Oleh karena itu Indonesia dituntut untuk dapat mengkaji potensi komoditi non-migas, khususnya komoditi manufaktur.

Mengingat sebagai negara yang terus membangun, ketergantungan terhadap ekspor masih tinggi, maka perlu mengkaji komoditi manufaktur yang memiliki keunggulan komparatif. Dari

beberapa penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keunggulan komparatif untuk komoditi manufaktur yang bersifat *unskilled labor intensive*, sedangkan *wood product* termasuk ke dalam kelompok ini. Oleh karena potensi hutan Propinsi Jambi masih dapat diandalkan, maka pemanfaatan limbah kayu untuk *wood product* dapat memupuk keunggulan ini menjadi lebih meningkat lagi. Salah satu upaya peningkatannya adalah melalui pemberdayaan.

Hal menarik lainnya adalah banyaknya kayu log yang keluar dengan tidak resmi dari hutan. Taksiran beberapa narasumber jumlah ini mencapai 30% dari produksi keseluruhan. Dalam satu tahun terakhir memang terlihat usaha perkayuan yang bertambah banyak di Kabupaten Muara Jambi (kabupaten baru yang tadinya merupakan bagian dari Kabupaten Batanghari).

Dari sisi kelestarian lingkungan hal ini mungkin lebih baik karena dalam *kegiatan pencurian* yang dilakukan masyarakat, mereka tidak menebas habis hutan. Hasil curian inipun ditampung oleh usaha-usaha penggergajian kayu berskala menengah. Barangkali pengusahaan hutan selayaknya ditata ulang dan tidak lagi diberikan pada pengusaha hutan secara besar-besaran, melainkan dialokasikan sedemikian rupa sehingga hasil yang lebih besar dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar.



DAFTAR PUSTAKA

Azis, Iwan J. 1990. *Perekonomian Asia-Pasifik dan Indonesia*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Bahan Diskusi Seminar (Tidak dipublikasikan).

Balassa, Bela. 1989. "Comparative Advantage, Trade Policy and Economic Development". New York: New York University Press.

Ellsworth, P.T., & J. Clark Leith. 1984. "The International Economy". Edisi Keenam. New York: MacMillan Publishing Company.

Oxley, Alan. 1990. "The Challenge of Free Trade". New York: Harvester Wheatsheaf.

Kartadjoemena, H.S. 1996. "GATT dan WTO: Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan". Jakarta: UI Press.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM-FEUI). 1992. "Studi Penentuan Keunggulan Komparatif Komoditi Ekspor Non-Migas Indonesia". Laporan Penelitian (tidak dipublikasikan). Jakarta.

Prawiro, Radius. 1998. "Indonesia's Struggle for Economic Development". New York: Oxford University Press.

Yoffie, David B., & Benjamin G. Casseres. 1994 "International Trade and Competition". New York: Mc. Graw Hill.

Yoffie, David B. 1993. "Beyond Free Trade: Firms, Governments, and Global Competition". USA: Harvard Business School.

Far Eastern Economic Review. 1996. "Asian Trade and Investment". Hongkong: Review Publishing Company Limited.

United Nations Industrial Development Organization. 1989. "International Comparative Advantage". Vienna: UNIDO.

Ekspor Jambi Menurut Pelabuhan Utama Tahun 1993-1997

Pelabuhan	1993	1994	1995	1996	1997
Kuala Tungkal	80.198	110.586	166.840	137.719	117.714
Muara Sabak	151.733	185.519	177.191	209.283	177.968
Jambi	119.812	152.866	215.806	227.426	211.590
Kampug Laut	0	7	0	52	1.902
Nipah Panjang	291	0	209	235	0
Kuala Pangkal Duri	20	44	0	0	0
Simbur Naik	0	2.272	0	0	0
Palmerah (U) Jambi	29	15	418	62	372
Total Ekspor	352.083	451.309	560.464	574.777	509.546

Sumber: Profil Perdagangan Luar Negeri Propinsi Jambi 1993-1997

Lampiran-2

Peranan Nilai Ekspor Propinsi Jambi Terhadap Nilai Ekspor Nasional
Tahun 1985 – 1997 (US\$, Persen)

TAHUN	EKSPOSR NASIONAL (US\$)	EKSPOSR JAMBI (US\$)	PERANAN (%)
1985	18.586.711.567	109.228.785	0,59
1986	14.805.041.417	121.943.462	0,82
1987	17.135.588.515	174.071.946	1,02
1988	19.218.501.537	234.264.324	1,22
1989	22.158.865.739	256.586.550	1,16
1990	25.675.331.072	228.339.010	0,89
1991	29.142.369.738	251.946.448	0,86
1992	33.966.997.185	248.052.285	0,73
1993	36.822.984.541	352.083.627	0,96
1994	40.053.436.459	451.309.090	1,13
1995	45.417.984.162	560.467.107	1,23
1996	49.814.754.442	574.777.825	1,15
1997	53.443.602.252	509.546.148	0,95

Sumber: Profil Statistik Perdagangan Luar Negeri Propinsi Jambi 1993-1997



LIPI

III

PEMBERDAYAAN INDUSTRI KERAJINAN KAYU RAKYAT

Oleh:

Januar Batubara & Jusmaliani

LIPI

III

PEMBERDAYAAN INDUSTRI KERAJINAN KAYU RAKYAT

Oleh:

Januar Batubara & Jusmaliani

3.1. Pendahuluan

Laporan ini disusun berdasarkan salah satu *pilot project* Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan oleh PEP-LIPI. Proyek ini melibatkan tim peneliti, pengrajin dan mitra lokal di Propinsi Jambi, tepatnya Kabupaten Muara Bulian. Proyek Pemberdayaan ini dimulai dengan pelatihan yang kemudian diikuti dengan tindakan pemberdayaan yang dalam kesempatan ini berupa pengguliran dana untuk tambahan modal kerja.

Sekalipun laporan ini adalah laporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, namun tidak terlepas dari analisis yang dilakukan tim peneliti. Metode deskriptif analitik, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif memberikan arahan untuk pengolahan pasca-proyek, sehingga pada bagian penutup sudah terlihat jelas apa yang sebaiknya dilakukan dengan proyek-proyek pemberdayaan seperti ini.

Hal lain yang perlu difahami adalah bahwa hakekat pemberdayaan bukanlah mencari keuntungan, sehingga harus disadari kemungkinan adanya dana yang tidak dapat dikembalikan oleh unit-unit usaha kecil ini. Dalam kondisi perekonomian yang baru akan memulai tahap pemulihan, *menjual* adalah sesuatu yang tidak mudah, oleh karena itu adalah sangat mungkin periode pengembalian pinjaman akan lebih panjang. Namun bagaimanapun program ini harus tetap dijalankan karena dengan semakin banyaknya usaha-usaha yang berkembang berarti akan semakin kuat pula tonggak-tonggak yang menyangga perekonomian daerah, suatu hal yang sangat diperlukan dalam rangka otonomi yang akan diberlakukan.

Resesi ekonomi yang masih berlanjut memperlihatkan bahwa industri kecil pada hakekatnya dapat lebih tegar terhadap meningkatnya nilai tukar dollar terhadap rupiah, tetapi karena berbagai konsep kemitraan dan keterkaitan yang digalakkan pemerintah, khususnya pola bapak angkat, maka tak urung industri kecil terkena pula imbas dari

resesi ini. Namun demikian oleh karena pada dasarnya jenis industri ini cukup fleksibel dengan investasi yang relatif kecil, maka membangunkannya kembali tidaklah sesukar membangun suatu industri besar yang sarat dengan kandungan impor.

Untuk menghilangkan ketergantungan pada bahan baku impor, adalah sangat wajar jika mayoritas aktifitas ekonomi diarahkan pada pemanfaatan sumber-sumber lokal. Di antara sumberdaya lokal yang cukup banyak di Jambi adalah kayu dan kayu ini digunakan pula oleh pengusaha kerajinan kayu rakyat sebagai bahan baku.

Usaha pemberdayaan dalam model ini, pada intinya adalah suatu upaya membangkitkan masyarakat, agar secepatnya terlepas dari beban resesi ekonomi melalui berbagai kegiatan ekonomi yang dikembangkan dari suatu kegiatan inti. Kegiatan inti dalam kasus ini adalah kerajinan kayu rakyat. Lebih jauh model ini adalah juga suatu uji-coba yang diharapkan dapat direplikasi pada berbagai kegiatan di propinsi tersebut ataupun di propinsi lainnya.

Selain karena pertimbangan bahwa bahan baku yang digunakan sumbernya dari Propinsi Jambi sendiri, kegiatan pemberdayaan ini dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan lainnya antara lain, usaha ini dapat memanfaatkan *scrap*⁶, melibatkan banyak usaha berskala kecil, potensial untuk ekspor. Lebih jauh lagi produk-produk yang dihasilkan dapat difungsikan sebagai cinderamata, sehingga sekaligus dapat membantu pengembangan pariwisata daerah.

3.1.1. Permasalahan

Dalam setiap aktifitas pemberdayaan, permasalahan utama adalah bagaimana agar pihak yang diberdayakan dapat berdiri sendiri, berkembang dan tidak tergantung lagi pada pihak luar. Bantuan yang pada akhirnya menciptakan ketergantungan tidak bermanfaat sama sekali bagi mereka yang dibantu, sekalipun dalam jangka sangat pendek tampaknya menarik.

⁶ Scrap yang dimaksud di sini adalah sisa penebasan kayu oleh HPH dalam bentuk tungkul dan akar. Diameter yang cukup besar memungkinkan membentuknya menjadi meja dan kursi, sedangkan scrap dari meja atau kursi dapat dibuat berbagai cinderamata.

3.1.2. Tujuan dan Sasaran

Pada dasarnya kegiatan ini merupakan suatu upaya alternatif untuk mengangkat kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui suatu kegiatan pemberdayaan dengan memotivasi masyarakat untuk menolong dirinya sendiri. Dalam kasus kerajinan kayu rakyat, tujuan kegiatan secara lebih rinci adalah:

1. Meningkatkan industri kerajinan kayu rakyat dan rangkaian aktifitas ekonomi (*cluster of economic activities*) yang mendahului maupun sesudahnya, khususnya kegiatan penyampaian produk ini pada konsumen akhir.
2. Pengenalan, pelatihan dan pengembangan teknologi yang ada kaitannya dengan industri kerajinan kayu rakyat.
3. Implementasi pemberdayaan melalui suatu program yang dirumuskan sendiri oleh pelaku kegiatan di sektor ini.

3.1.3. Manfaat Yang Diharapkan

Manfaat yang diharapkan dalam jangka pendek adalah terwujudnya usaha-usaha kecil yang mandiri dan potensial untuk pengembangan daerah. Dalam jangka panjang, usaha-usaha yang telah diberdayakan ini secara bersama-sama akan mampu memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi PDRB.

3.2. Kerangka Konseptual Pemberdayaan

Sebelum menjelaskan kerangka konseptual terlebih dulu akan diuraikan secara garis besar tahapan yang dilaksanakan dalam pemberdayaan ini. Hal ini perlu agar kerangka konseptual yang dijelaskan kemudian dapat lebih difahami. Dalam kerangka konseptual terlihat adanya dua tim yaitu tim peneliti dan tim pengembangan, keberadaan kedua tim inilah yang akan diuraikan di sini.

Sesuai dengan tujuan pemberdayaan, yaitu membantu membangkitkan motivasi masyarakat agar mau dan mampu membantu dirinya sendiri, maka konsep yang digunakan disini haruslah melibatkan semaksimal mungkin potensi sumberdaya manusia daerah. Sebagai langkah awal tim peneliti mengalihkan teknologi yang umum harus dikuasai oleh setiap unit usaha yaitu metode pemecahan masalah

*(problem-solving method)*⁷ kepada pimpinan unit-unit usaha lokal. Mereka inilah yang pada tahap awal sebagai peserta pelatihan.

Pada akhir tahap pelatihan, peserta yang dibagi kedalam beberapa kelompok akan keluar dengan proposal pemecahan masalah bagi kelompok usaha mereka. Jadi output dari proses pelatihan ini adalah beberapa proposal, yang kemudian akan diseleksi oleh tim peneliti mana yang paling *feasible*, berdasarkan beberapa kriteria seperti dana, ROI, ketersediaan SDM dan sebagainya.

Selain itu dalam pelatihan dilakukan pula pengamatan terhadap peserta sehingga akan dapat diseleksi peserta mana yang dapat diandalkan sebagai anggota tim pengembangan. Tim inilah nantinya diharapkan dapat bekerja berdampingan dengan tim peneliti untuk memberdayakan usaha tersebut. Tim ini dapat saja diformalkan bentuknya menjadi yayasan atau tetap berbentuk tim. Dua pilihan ini, apakah tetap berbentuk tim atau meningkat sebagai yayasan memiliki kekurangan dan kelemahannya sendiri-sendiri.

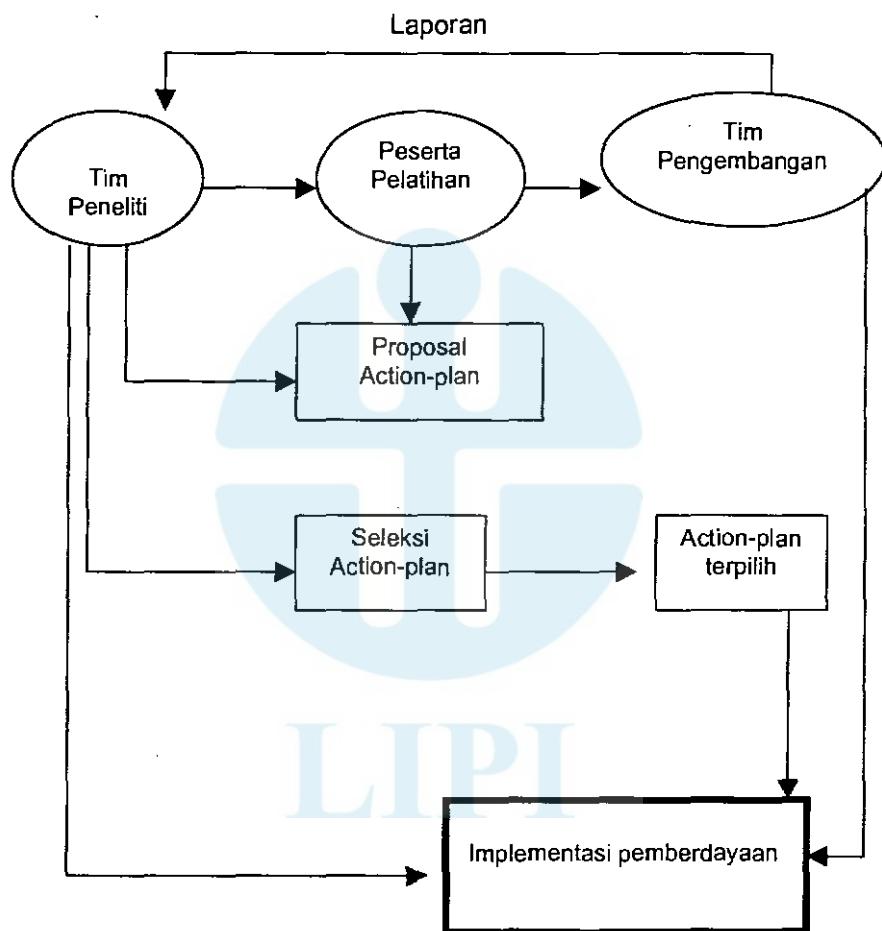
Tim ini kemudian akan mengimplementasikan apa yang telah dirumuskan dalam proposal terpilih. Dalam kasus kerajinan kayu rakyat ini, proposal terpilih adalah bantuan keuangan, khususnya untuk modal kerja (*working plan*). Dalam kunjungan awal, tim peneliti menemukan bahwa masih banyak pengusaha kecil kayu yang belum mendapatkan akses terhadap sumber modal.

Setelah tim pengembangan terbentuk dan proposal yang akan diimplementasikan telah pasti, maka tim peneliti bersama tim pengembangan mengadakan seleksi lagi terhadap calon-calon penerima dana. Kriteria utama adalah belum mendapatkan bantuan sama sekali (apakah dari program Koperasi ataupun dana 5% keuntungan BUMN atau lainnya) dan prospek usaha. Prospek usaha penting untuk dikaji karena kemampuan mengembalikan dana secara implisit tercermin dari sini. Operasional harian kemudian akan dilaksanakan oleh tim pengembangan, termasuk memonitor usaha penerima dana dan mengumpulkan kembali dana pinjaman tersebut.

⁷ Metode pemecahan masalah ini dianggap sebagai titik-tolak karena kurangnya pengetahuan tentang hal inilah yang menyebabkan hampir semua jajaran pemerintah menggunakan konsultan dalam hampir setiap masalah krusial yang mereka hadapi, padahal tidak jarang masalah tersebut sifatnya sangat internal dan sulit difahami konsultan luar. Anehnya karena pemerintah selalu mengandalkan konsultan untuk hampir setiap permasalahan, merekapun merasa pengusaha kecil lebih tidak tahu lagi, sehingga mereka mulai memformulasikan berbagai program bantuan dan bertindak sebagai konsultan bagi pengusaha kecil ini. Program yang dirancang sepihak ini sering sekali tidak mengena pada akar permasalahannya.

Pembagian kerja dan hubungan antara kedua tim ini dapat digambarkan sebagai berikut:

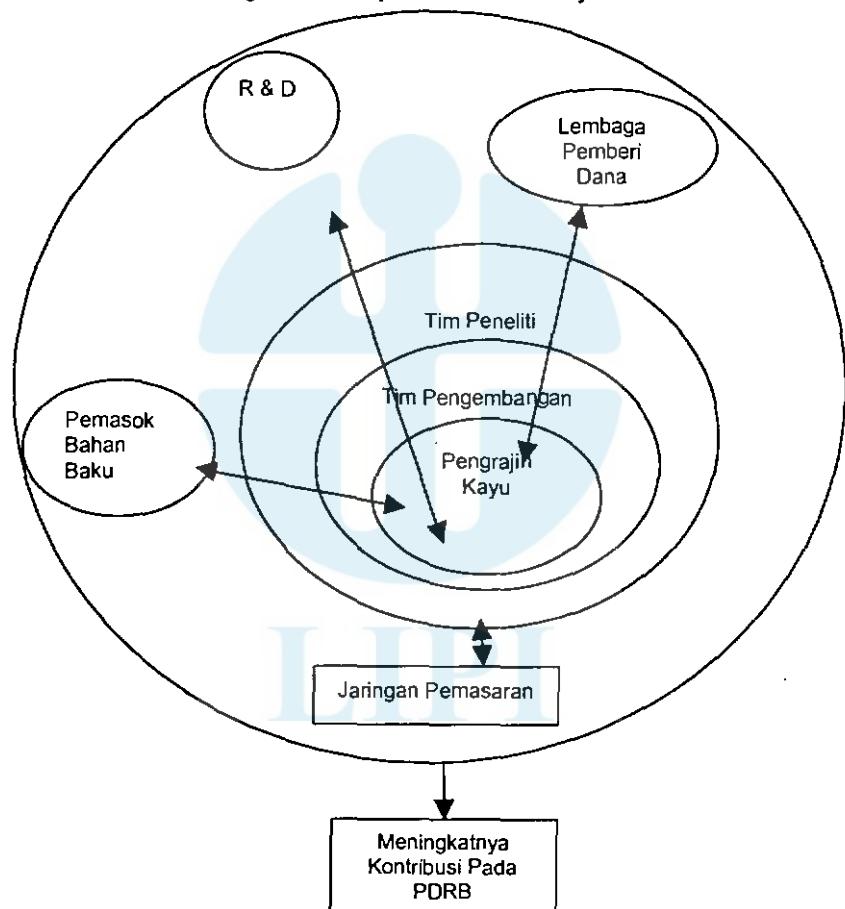
Bagan III-1



Tugas tim pengembangan tidak berhenti sampai disini, melainkan berlanjut terus dengan berbagai usaha pengembangan lainnya, sehingga pada akhirnya dapat menciptakan suatu jaringan kerja (*network*) yang kuat di antara aktifitas inti (*core activity*) kerajinan kayu rakyat dengan aktifitas pendukung dalam bentuk aktifitas pendahulu (misalnya, pasokan bahan baku) dan aktifitas.

Bagan III-2

Kerangka Konseptual Pemberdayaan



Keterangan:

- Pengrajin kayu yang dimaksud adalah banyak pengrajin dalam skala kecil yang membangun suatu kemitraan horizontal.
- Network yang terjadi antara berbagai institusi dalam lingkaran ini secara keseluruhan diharapkan akan meningkatkan PDRB.

Ke muka (misalnya, pemasaran). Dengan demikian sesuai dengan konsep otonomi daerah maka tim pengembangan sebagai mitra lokal dari tim peneliti akan lebih aktif berperan dalam memajukan daerahnya. Dalam bentuk sederhana kerangka konseptual pemberdayaan ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Dasar pemikiran untuk program pemberdayaan ini adalah diperlukannya ***kemitraan horizontal***, yaitu kerjasama antara beberapa unit usaha agar dapat menarik manfaat bersama. Sebagai contoh seandainya secara bersama, pengusaha-pengusaha kecil ini dapat membentuk unit pengeringan kayu, maka mereka akan menarik manfaat yang tidak sedikit dari kerjasama ini. Kemudian jika mereka berhasil memenuhi pesanan dalam jumlah besar dengan standar mutu yang tinggi, maka tentunya peluang ekspor akan lebih terbuka.

3.3. Pelaksanaan Pemberdayaan

3.3.1. Deskripsi Lokasi Kegiatan

Sewaktu kegiatan ini bermula, Propinsi Jambi secara administratif dibagi dalam enam daerah tingkat II, yaitu Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo Tebo, Kabupaten Sarolangun Bangko, Kabupaten Batanghari, dan Kodya Jambi. Lokasi kegiatan ini adalah di Kabupaten Batanghari tepatnya di Muara Bulian (ibukota).

Kabupaten Batanghari mempunyai batas sebelah Utara dengan Kabupaten Tanjung Jabung, sebelah Selatan dengan Propinsi Sumatera Selatan, sebelah Barat dengan Kabupaten Bungo Tebo dan sebelah Timur dengan Kabupaten Tanjung Jabung (lihat peta). Kabupaten Batanghari terdiri dari enam kecamatan, yaitu: Muara Bulian, Muara Tembesi, Jambi Luar Kota, Mersam, Sekernan, dan Kumpeh.

Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 1997 jumlah penduduk Jambi sebanyak 2.466.606 jiwa, dengan tingkat pertumbuhan sejak tahun 1990 sebesar 2,91 persen. Propinsi Jambi merupakan salah satu penempatan transmigrasi. Jika dilihat dari segi kepadatan penduduk tahun 1997, maka kepadatan rata-rata per kilometer persegi di Propinsi Jambi sebanyak 46 orang/Km persegi.

Pada mulanya kerajinan kayu dikembangkan di Desa Pulau Betung, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, Propinsi Jambi. Letaknya 29 km dari kota Jambi dapat dilalui oleh angkutan jalan raya yang menghubungkan Jambi dengan Muara Bungo. Penduduk Desa

Pulau Betung 1.585 orang dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 345.

Secara umum diperkirakan bahwa pengrajin kayu di desa ini sebanyak 600 orang walaupun bukan seluruh pengrajin ini bekerja secara khusus sebagai pengrajin. Di antara mereka ada juga yang mata pencaharian utamanya dari pertanian sedangkan pekerjaan sebagai pengrajin merupakan penghasilan tambahan. Lama kelamaan usaha kerajinan kayu berkembang sehingga penduduk di sekitar Desa Pulau Betung seperti penduduk di Desa Ture dan Desa Lopak Aur turut berkiprah dalam kerajinan kayu.

Sekalipun pendidikan penduduk di desa ini umumnya paling tinggi lulusan SMP⁸, namun demikian tidak menghalangi sebagian dari mereka untuk menjadi pengusaha kerajinan kayu ataupun membuka *show-room* untuk produk-produk yang dihasilkan. Dengan dukungan dan bantuan pemerintah, usaha kerajinan kayu Desa Pulau Betung berkembang dan menyebar pula ke desa sekitarnya. Akhirnya hasil kerajinan kayu dari daerah ini makin lama makin dikenal masyarakat di dalam negeri maupun luar negeri seperti Malaysia, Singapura dan Thailand. Belakangan ini hasil kerajinan kayu Pulau Betung juga dikenal di Australia melalui wisatawan yang berkunjung ke Bali.

3.3.2. Rekrutmen Pelatihan dan Pembinaan

Seperti telah diuraikan di muka, kegiatan pemberdayaan pada intinya dibagi ke dalam dua jenis kegiatan, yaitu: pelatihan dan pembinaan. Kegiatan pelatihan dilaksanakan pada minggu terakhir bulan Juli 1999 selama tiga hari. Sebelum kegiatan ini dilakukan terlebih dulu tim peneliti mengunjungi lokasi untuk mengenali karakteristik usaha perkayuan dan terlebih lagi karakteristik pengusaha kecil dan pengrajin yang terlibat langsung dalam proses produksi.

Tujuan dari pelatihan adalah memberdayakan unit-unit usaha sekaligus calon-calon anggota tim pengembang untuk mampu merumuskan sendiri permasalahan, dan mencari solusi pemecahan dengan pendekatan pengetahuan praktis tentang pengelolaan usaha kecil, yang menyangkut aspek produksi, pemasaran, dan keuangan.

Kunjungan awal yang dilakukan tim sangat membantu dalam proses rekrutmen dan rancangan materi pelatihan. Materi dan cara penyampaian disesuaikan dengan daya serap peserta yang rata-rata

⁸ Hal ini sangat boleh jadi disebabkan karena SMA di Pulau Betung baru mulai dibuka pada tahun 1994.

lulusan SMP sehingga komunikasi dalam proses pelatihan dapat membangkitkan motivasi mereka.

Pelatihan diberikan oleh tim peneliti, dengan topik ***Mengatasi Permasalahan Melalui Analisis Kegiatan Ekonomi Terpadu di Jambi***. Jumlah peserta sekitar 16 orang yang terdiri dari para pengrajin kayu yang berada di Jambi (tidak terbatas hanya dari Kabupaten Batanghari). Rekrutmen peserta dilakukan dengan kerjasama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batanghari. Menjelang akhir dari pelatihan peserta diminta untuk membuat *proposal action-plan* dengan format yang sederhana sebagai dasar pemilihan untuk kegiatan pembinaan.

Metode pelatihan lebih kepada workshop dan tidak klasikal. Para peserta dibagi kedalam lima kelompok, dimana diskusi inter- dan intra- kelompok dilakukan secara intens, sampai setiap kelompok menemukan, memahami dan melihat solusi terhadap masalah yang mereka hadapi. Metode klasikal memang dihindarkan karena hanya akan membosankan. Selama periode latihan terlihat sekali antusiasme dari para peserta.

Kegiatan pembinaan merupakan tahapan lanjutan dari kegiatan pelatihan, yang merupakan inti dari kegiatan proyek pemberdayaan ini. Oleh karena itu diperlukan seleksi yang relatif ketat untuk menentukan pihak yang layak untuk dijadikan objek pemberdayaan. Dalam hal ini seleksi yang dilakukan tim terdiri dari dua macam. Seleksi pertama adalah seleksi terhadap peserta pelatihan untuk memilih dan menentukan anggota tim pengembangan seleksi kedua adalah seleksi untuk memilih beberapa *proposal action-plan* sebagai program pemberdayaan.

3.3.3. Kelembagaan

Tahap lanjutan dari kegiatan pembinaan adalah membentuk suatu lembaga untuk merealisir kegiatan pemberdayaan tersebut. Untuk tujuan ini tim pengembangan yang terbentuk sebagai output pelatihan diformalisir menjadi Yayasan. Kelembagaan berbentuk yayasan ini didirikan berdasarkan akte notaris Nomor: 3, tanggal 13 September 1999, dengan nama YAYASAN USAHA KARYA UNGGUL. Pendiri yayasan merupakan kombinasi di antara tiga peneliti PEP-LIPI, dan dua narasumber dari daerah Jambi satu diantaranya dari Universitas Jambi. Adapun pengurus inti Yayasan berjumlah tiga orang, semuanya adalah mantan peserta latihan, sehingga kemampuannya sudah diketahui.

Untuk memperjelas posisi Yayasan Usaha Karya Unggul dengan PEP-LIPI dalam kaitannya dengan program pemberdayaan, maka dibentuk kerjasama antara kedua belah pihak berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama No.: 310/1.2/KS/IX/1999, bulan September 1999 tentang penerapan IPTEK daerah dalam pemberdayaan usaha kecil di Propinsi Jambi (tepatnya di Kabupaten Batanghari).

3.3.4. Mekanisme Penyaluran Dana dan Pemanfaatannya

Penyaluran dana pemberdayaan dilakukan melalui Yayasan Usaha Karya Unggul. Operasionalisasi penyaluran dana selanjutnya dikendalikan oleh pihak yayasan yang aktif melakukan penilaian terhadap setiap calon penerima guliran dana. Seperti telah disinggung di muka dua kriteria utama yang digunakan dalam seleksi penerima dana adalah: pertama mereka tidak/belum mendapatkan akses terhadap sumber modal dan kedua prospek usaha.

Penerima dana diwajibkan mulai mencicil setiap bulan setelah dana diterima ditambah dengan iuran operasional sebesar 10% untuk 10 bulan dari pinjaman.

3.3.5. Kendala yang Dihadapi

Kendala yang dihadapi tim pengembang adalah lokasi pengrajin yang sekalipun mengelompok dalam satu desa tetapi cukup jauh dari jalan utama, sehingga untuk mencapainya diperlukan sepeda motor. Kemudian setelah pengguliran dana dimulai, masalah berikutnya adalah banyaknya pengrajin lain yang juga meminta dana, sehingga dana yang masuk dalam dua bulan pertama siap untuk digulirkan kembali.

3.4. Analisa Ekonomi Proyek

Sebelum lebih dalam melakukan analisa finansial dan ekonomi proyek, terlebih dulu akan diberikan deskripsi tentang pengrajin kayu di Pulau Betung. Uraian lebih rinci dilakukan dengan mengangkat kasus Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Dalam skalanya yang relatif kecil, KUBE ini menggambarkan suatu model kemitraan horizontal yang telah disinggung di muka. Selain itu estimasi untuk biaya juga menggunakan data dari KUBE.

3.4.1. Pengrajin Kayu di Pulau Betung

Unit usaha kerajinan kayu sampai dengan bulan Juni 1998 adalah 132 unit usaha dengan jumlah total tenaga kerja yang bekerja di unit usaha ini sebanyak 330 orang. Usaha ini berkembang terus dan pada bulan Juni 1999 (setelah satu tahun) unit usaha meningkat menjadi sekitar 200 yang menyerap tenaga kerja sebanyak 600 orang. Angka ini tidak selalu tepat jumlahnya karena di daerah ini pengrajin kayu terdiri dari 3 kelompok yaitu:

1. pengrajin yang mengerjakan kayu saja
2. pengrajin yang juga mengerjakan pertanian
3. pengrajin yang juga sebagai pedagang, baik pedagang komoditi pertanian maupun pedagang kecil kerajinan kayu.

Oleh sebab itulah angka pengrajin kayu tidak selalu tepat karena tergantung pada usaha pokok yang dicantumkan pada pendaftaran pekerjaan. Biasanya kalau usaha utamanya adalah pertanian, tetapi juga sebagai pengrajin kayu, yang didaftarkannya adalah usaha pertanian. Jumlah unit usaha dan tenaga kerja di lingkungan kerajinan kayu Pulau Betung ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel III-1.

Jumlah Unit Usaha dan Tenaga Kerja Kerajinan Kayu Pulau Betung
1994-1998

Tahun	Unit Usaha	Tenaga Kerja
1994	75	177
1995	86	197
1996	96	231
1997	106	257
1998	132	330
r (%)	12,00	13,26

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batanghari, Muara Bulian.

Dari tabel di atas kelihatan bahwa jumlah unit usaha meningkat terus dari tahun 1994 ke tahun 1998 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 12 persen per tahun. Demikian pula tenaga kerja yang bekerja di

unit usaha ini meningkat terus dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 13,26 persen per tahun. Tingkat pertumbuhan tenaga kerja yang lebih besar dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan unit usaha mengindikasikan adanya pertambahan tenaga kerja dalam setiap unit usaha.

Jumlah tenaga kerja (pengrajin) tahun 1998 adalah 330 orang, telah meningkat menjadi 600 orang pada waktu penelitian ini dilakukan. Mereka terdiri dari pengrajin yang ikut dalam unit usaha dan pengrajin yang berdiri sendiri yang juga merupakan pengrajin yang menunggu perintah kerja dari unit usaha.

Berbeda dengan usaha kecil lainnya yang mengalami kerosotan pada waktu krisis ekonomi yang berawal pada pertengahan tahun 1997, kelihatan bahwa usaha kerajinan kayu ini tidak mengalami kemunduran, bahkan meningkat terus. Hal ini disebabkan oleh produk kerajinan kayu ini merupakan cinderamata yang masih dibutuhkan. Di samping itu produk ini terutama kursi adalah komoditi ekspor walaupun diekspor melalui Batam.

Pemasaran langsung hasil industri kerajinan kayu dilakukan di kios-kios (show-room) sepanjang jalan raya antara Kota Jambi dan Muara Bulian. Jumlah kios sampai dengan tahun 1998 yang dikelompokkan menurut ukurannya yang didasarkan pada dua kriteria yaitu nilai bangunan dan nilai stok barang. Pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut:

Tipe Kios	Nilai Bangunan (Rp.000)	Nilai Stok Barang (Rp. 000)
1. Kecil	< 1.500	800 – 1.300
2. Sedang	1.500 – 4.000	1.301 – 3.000
3. Besar	> 4.000	> 3.000

Sesuai dengan pengelompokan tersebut, jumlah kios di Pulau Betung ditunjukkan oleh Tabel III.2 berikut :

Tabel III.2

Jumlah Kios Menurut Ukuran Kecil, Sedang dan Besar di Pulau Betung
Tahun 1994 – 1999

Tahun	Jumlah Kios	Ukuran		
		Kecil	Sedang	Besar
1994	31	18	12	1
1995	40	27	11	2
1996	40	27	10	3
1997	49	36	9	4
1998	35	21	10	4

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batanghari, Muara Bulian.

Dari tabel di atas kelihatan bahwa sampai tanun 1997 jumlah kios bertambah, tetapi tahun 1998 menurun menjadi 35. Perubahan yang menyolok adalah kios yang digolongkan kecil menurun dari 36 unit pada tahun 1997 menjadi 21 pada tahun 1998, sedangkan kios ukuran sedang bertambah 1 unit. Perubahan kios ukuran kecil ini dapat dimaklumi karena terjadinya krisis ekonomi, dimana pengusaha kecil tidak mampu menghadapi krisis tersebut. Perusahaan sedang bertambah satu kios, sedangkan perusahaan besar jumlahnya dapat bertahan. Krisis ekonomi membantu usaha sedang dan besar karena usaha mereka yang memasarkan produk kerajinan kayu rakyat itu ke luar negeri dengan harga yang tinggi terutama melalui Pulau Batam.

Ada pula yang dijual melalui pedagang di kota Jambi, dengan tujuan akhirnya diekspor. Tidak mengherankan apabila kios yang sedang dan besar ini dapat bertahan, karena mereka dibantu oleh pemasaran ke luar negeri. Sampai sekarang kios golongan besar masih dapat bertahan dan mencari daerah pemasaran yang lebih luas. Kios golongan kecil berkurang karena mereka biasanya menanti pembeli yang kebetulan lewat di daerah itu dan pembeli seperti itu jumlahnya tidak banyak. Lagi pula mereka tidak dapat menahan barang terlalu lama karena keterbatasan modal, sedangkan barang kerajinan itu harus dibayar tunai kepada pengrajin. Dalam hal ini jelas kelihatan bahwa di antara pengusaha kerajinan kayu juga terjadi persaingan, terutama untuk pemasaran. Pemasaran produk dilakukan ke daerah luar Jambi seperti Sumatera Barat, Bengkulu dan Lampung yang tidak mungkin dilakukan oleh pengusaha ukuran kecil.

3.4.2. Bahan Baku dan Jenis Produk

Kegiatan pengrajin kayu menggunakan bahan baku utama kayu yang terdiri dari kayu rengas, tembesu, stebal, ludri, durian, belantri dan sebagainya. Bahan pembantu antara lain: sanding, oker warna, sirlak, tinner, amplas dan sebagainya. Kayu yang digunakan berasal dari daerah setempat (di desa tempat pengrajin), walaupun belakangan ini sudah mulai berkurang. Apabila bahan kayu didatangkan dari luar desa, akan menambah biaya yaitu biaya transpor yang jumlahnya tidak sedikit sehingga menambah biaya untuk berproduksi. Akibatnya harga jual produk akan meningkat dan dapat menurunkan volume penjualan. Oleh sebab itu mereka berusaha membuat desain baru yang dapat memenuhi selera konsumen. Disinilah diperlukan bahan baku penolong untuk memberi warna yang menambah keindahan produknya.

Motif/ukiran terdiri dari “belitan akar” dan “ukiran”. Motif belitan akar ini kelihatan pada meja, kursi, sedangkan ukiran kelihatan pada guci, asbak, vas kembang, sangkutan topi, bentuk ikan dan lain-lain. Jenis meja/kursi dengan motif belitan akar adalah meja telepon, meja oshin, kursi mayang, kursi taman dan kursi santai. Produk ini menggunakan bahan baku kayu tergantung pada ukurannya. Umumnya kursi menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu gelondongan dan diukir seperti belitan akar.

3.4.3. Analisa Proyek

Pada umumnya setiap orang berusaha untuk memperbaiki tingkat taraf hidupnya dengan berbagai kegiatan usaha, sesuai dengan bakat, keahlian serta kemampuan masing-masing. Dalam rangka meningkatkan taraf hidup, manusia dihadapkan dengan terbatasnya faktor produksi yang merupakan input dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Suatu kegiatan yang menggunakan faktor produksi diharapkan memperoleh manfaat (*benefit*), kemudian dinamakan proyek. Dalam pengertian proyek, kelihatan adanya tiga faktor yaitu: faktor investasi modal yang merupakan biaya, faktor manfaat (*benefit*) yang diharapkan serta faktor jangka waktu (Zulkarnain Djamin, 1984:2).

Mengingat pentingnya suatu proyek, maka sebelum dilaksanakan, harus lebih dahulu direncanakan, agar terdapat suatu pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam proyek tersebut. Oleh sebab itu diperlukan perencanaan yang merupakan salah satu cabang Manajemen Proyek, dimana Manajemen Proyek itu sendiri adalah salah satu cabang Manajemen. Bidang ini tumbuh dan berkembang karena adanya kebutuhan dalam dunia industri modern

untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang kian kompleks (Dennis Lock, 1990: 1).

Dalam suatu kegiatan, jarang sekali dijumpai manajer proyek, terlebih dalam usaha kecil, sekalipun sebenarnya tugas tersebut tetap ada yang melaksanakannya. Mereka ini tidak disebutkan sebagai manajer proyek, tetapi banyak ragam penamaan untuk yang melakukan jabatan tersebut. Diambil salah satu contoh dalam industri kerajinan kayu di Pulau Betung (Jambi). Sebelumnya telah dikemukakan munculnya satu kelompok usaha pengrajin yang melakukan usaha secara bersama-sama (usaha bersama).

Usaha bersama yang mengkoordinasikan 10 orang pengrajin ini disebut Kelompok Usaha Bersama Karya Harapan Indah (KUBE) yang dikepalai oleh seorang Ketua, dengan beberapa orang pembina. Dalam organisasi seperti ini adalah sangat mungkin bahwa yang menjadi manajer proyek adalah ketuanya. Kemudian pelaksanaan diserahkan kepada beberapa anggota yang dikepalai oleh pembina. Kelompok tersebut kemudian dikatakan "Tim Mandiri" yang dikembangkan oleh kelompok itu sendiri. Tim Mandiri berbeda dengan kelompok kerja tradisional, karena tim mandiri ini, anggotanya mempelajari keahlian baru untuk dapat berhasil sebagai anggota tim mandiri (Richard Y. Chang, 1998: 5).

Keahlian yang memberikan sumbangan bagi keberhasilan sebuah tim mandiri adalah, kepemimpinan, manajemen proyek, bimbingan dan umpan balik dari rekan kerja, pemecahan masalah bersama kelompok. Dalam rangka Pemberdayaan Industri Kerajinan Kayu Rakyat di Jambi (khususnya di Pulau Betung) telah diadakan pelatihan oleh tim peneliti dari PEP-LIPI dengan pengharapan bahwa para peserta pelatihan selain mempunyai keahlian kerajinan kayu, juga mengerti bidang lain yang diperlukan dalam tim mandiri seperti keahlian yang disebutkan di atas.

Materi pelatihan antara lain, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan serta pembuatan *cash-flow* sederhana. Sekalipun materi ini cukup kompleks, diusahakan penyederhanaan sedemikian rupa sehingga mudah diserap oleh peserta pelatihan sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. Semua materi sudah diarahkan khusus pada kerajinan kayu dan lebih terfokus dengan contoh-contoh yang sederhana. Dalam hal ini juga diharapkan peserta pelatihan memahami manajemen proyek.

3.5. Analisa Finansial

Dua hal yang disorot dalam analisa finansial ini adalah perencanaan keuangan dan arus kas (*cash-flow*).

3.5.1. Perencanaan Keuangan

Sebelum mengadakan analisa keuangan (analisa finansial), perlu dikemukakan pengertian Manajemen Keuangan (*Financial Management*) yang terdiri dari Perencanaan Keuangan, Investasi dan Pembagian Dividen. Perencanaan Keuangan penting agar terhindar dari kegagalan karena sepanjang pelaksanaan investasi dalam proyek dapat dilakukan pengendalian. Manajemen keuangan dapat menggunakan laporan keuangan (*business*) untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu kegiatan investasi (Mackay, 1986: 2). Menurut Mackay, delapan dari sepuluh perusahaan yang baru biasanya mengalami kegagalan karena lemah dalam perencanaan keuangan. Salah satu alat yang digunakan dalam perencanaan keuangan adalah Arus Kas (*The Cash Flow Statement*), disamping alat lainnya seperti Neraca, Laporan Rugi/Laba dan sebagainya.

Dalam pembahasan ini dikemukakan hanya mengenai arus kas, karena usaha kecil jarang membuat laporan keuangan seperti neraca. Arus kas menunjukkan beberapa kas yang diperlukan untuk membayar pengeluaran (*expenses*) dan kapan diperlukan. Demikian pula kas perlu diketahui pemasukannya, sehingga apabila tidak sesuai waktunya, diperlukan dana dari pinjaman. Dalam hal ini proyeksi arus kas hanya dilakukan yang berkaitan dengan transaksi aktual yang menyangkut kas, sedangkan non kas seperti penyusutan tidak dimasukkan (Mackay, 1985: 35).

Arus kas ini didasarkan pada estimasi penjualan, sehingga diperoleh nilai penjualan yang akan datang dan diketahui berapa besar pengeluaran untuk menghasilkan barang yang akan dijual tersebut. Arus kas digunakan hanya untuk keperluan intern, agar dapat mengantisipasi masalah yang timbul dalam pelaksanaan proyek. Tujuannya untuk membandingkan yang direncanakan dengan yang aktual sehingga kalau terjadi penyimpangan, segera dapat diatasi. Dalam hal ini perencanaan arus kas dibuat secara bulanan.

Pada umumnya kesalahan perencanaan keuangan dan penggunaan dana akan mengakibatkan kegagalan beberapa usaha (Sharma, 1990: 126). Menurut Sharma perencanaan keuangan yang baik tergantung pada beberapa faktor yaitu:

- a. Jumlah dana yang dibutuhkan
- b. Jangka waktu penggunaan dana
- c. Intensitas penggunaan dana
- d. Sumber dana.

Kalau faktor-faktor tersebut diperhatikan dan direncanakan, maka pelaksanaan pekerjaan akan berjalan lancar dan tidak terganggu karena masalah keuangan. Berdasarkan penelitian di India (Sharma, 1990: 127-128) kebutuhan dana industri barang keperluan olah raga, 78 persen berasal dari sumber yang tidak terorganisir (*unorganized sources*). Hal ini terjadi karena dana yang diperlukan adalah jangka pendek dengan resiko kecil dan prosedur yang relatif singkat dibanding dengan memperoleh dana dari sumber yang terorganisir seperti Bank dan lembaga keuangan lainnya.

Berdasarkan survei pada pengusaha kerajinan kayu, hal yang sama juga terjadi, mereka mengalami kesulitan dana yang dibutuhkan untuk membayar upah kerja. Dalam rangka pemberdayaan termasuk pengguliran dana, kelihatannya bahwa pengrajin akan tertolong dalam memperoleh dana yang termasuk dalam sumber yang tidak terorganisir (*unorganized*) terutama untuk dana operasional.

3.5.2. Arus Kas (Cash Flow)

Sekali lagi dikemukakan bahwa laporan arus kas ini adalah untuk kepentingan pengelola (intern) agar segera dapat mengetahui masalah yang dihadapi atau penyimpangan yang terjadi untuk perbaikan selanjutnya. Untuk mengetahui biaya yang aktual dan akurat perlu dibuat perkiraan penentuan harga jual yang disebut "*Pricing Policy*" (Mackay, 1986: 47). Biaya ini diperlukan untuk mengetahui pengeluaran, kemudian harga jual ditetapkan yaitu biaya ditambah keuntungan digunakan untuk memperkirakan penerimaan (*cash-flow*).

Untuk menentukan biaya produksi, diperlukan informasi mengenai:

- a. biaya bahan baku langsung
- b. biaya tenaga kerja langsung
- c. pengeluaran overhead (biaya yang berkaitan dengan operasi)
- d. keuntungan yang diharapkan.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, data dari pengrajin kurang lengkap karena mereka tidak mempunyai catatan, maka data yang digunakan dalam pembahasan ini adalah dari Kelompok Usaha Bersama Karya Harapan (KUBE) dengan 10 anggota (pengrajin) dalam jangka waktu 2 minggu. Dalam hal ini tim menggunakan asumsi bahwa biaya yang dikeluarkan pengrajin lainnya sama dengan yang berlaku di KUBE (lihat lampiran).

Tabel III.3
Biaya Produksi (2 minggu)

- Bahan baku 100 potong kayu @ Rp. 10.000,-	1.000.000,-
- Bahan pembantu: melamin dsb.	1.500.000,-
- Tenaga kerja langsung (10 orang) @ Rp. 200.000,-	2.000.000,-
- Pengeluaran overhead	1.000.000,-
Total	5.500.000,-

Sumber: Hasil survei.

Penerimaan dari penjualan (hasil produksi 2 minggu) adalah sebagai berikut:

Tabel III.4
Hasil Penjualan

1 set kursi mayang	@ Rp. 1.500.000,-	1.500.000,-
5 set kursi taman	@ Rp. 800.000,-	4.000.000,-
10 buah meja telepon	@ Rp. 100.000,-	1.000.000,-
3 tempat buah tinggi	@ Rp. 75.000,-	225.000,-
50 asbak	@ Rp. 4.000,-	200.000,-
Total		6.925.000,-

Sumber: Hasil survei.

Laporan Rugi/Laba	
Penjualan	Rp. 6.925.000,-
Biaya produksi	Rp. 5.500.000,-
<hr/>	<hr/>
Laba Kotor	Rp. 1.425.000,-
Pengeluaran lainnya	Rp. 50.000,-
<hr/>	<hr/>
Laba bersih	Rp. 1.375.000,-

Return on Investment (ROI) =

$$\begin{array}{c}
 \text{Penjualan} \quad \quad \quad \times \quad \text{Laba bersih} \\
 \hline
 \text{Modal yang digunakan} \quad \quad \quad \quad \quad \quad \text{Penjualan} \\
 \hline
 \text{Rp. 695.000} \quad \quad \quad \times \quad \text{Rp. 1.375.000} \\
 \hline
 \text{Rp. 5.500.000} \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad = 25\% \\
 \text{Rp. 6.925.000}
 \end{array}$$

Dari segi ROI investasi ini masih layak, artinya tingkat pengembalian dari investasi sebesar 25% masih lebih tinggi dibandingkan dengan bunga yang akan dibebankan sebesar 12%. Dari pertimbangan di atas, laba yang diperoleh setiap bulan adalah $2 \times \text{Rp. } 1.375.000,- = \text{Rp. } 2.750.000,-$. Jumlah pengrajin adalah 10 orang, sehingga setiap orang akan memperoleh laba bersih setiap bulan $\text{Rp. } 2.750.000,-$ dibagi 10 = $\text{Rp. } 275.000,-$.

Seandainya pengrajin yang menerima bantuan dana dapat bekerja dengan model dari KUBE maka bantuan dana sebesar Rp. 2.500.000,- dapat dikembalikan selama 10 bulan dengan perhitungan sebagai berikut:

Pinjaman pokok Rp. 250.000,-

dilunasi selama 10 bulan = $\text{Rp. } 2.500.000,- : 10 = \text{Rp. } 250.000,-$ ditambah dengan biaya administrasi sebesar $1\% \times \text{Rp. } 2.500.000,- = \text{Rp. } 25.000,-$. Jumlah angsuran setiap bulan:

$\text{Rp. } 250.000,- + \text{Rp. } 25.000,- = \text{Rp. } 275.000,-$.

Apabila jumlah pinjaman Rp. 2.000.000,- maka angsuran setiap bulan $\text{Rp. } 200.000,- + \text{Rp. } 20.000,- = \text{Rp. } 220.000,-$.

Dalam penentuan layak atau tidak suatu investasi dapat dilihat dari berbagai perhitungan seperti:

- a. Payback Period
- b. Net Present Value (NPV)
- c. Internal Rate of Return (IRR)

Oleh karena proyek ini masih sangat sederhana, cukup dengan menggunakan Payback Period = Investasi + biaya administrasi

$$\begin{aligned}
 & \text{Jumlah angsuran} \\
 & = \frac{\text{Rp. } 2.750.000,-}{\text{Rp. } 275.000} = 10 \text{ bulan}
 \end{aligned}$$

Jadi dalam waktu 10 bulan dapat dikembalikan pinjaman pokok + biaya administrasi. Jumlah dana dan pinjaman (10 orang) ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel III.5

Jumlah Dana Yang Diberikan Kepada 10 Orang Pengrajin
Bulan September 1999 (Cash Outflow)

Nomor Peminjam	Jumlah Peminjam
1	2.500.000,-
2	2.500.000,-
3	2.500.000,-
4	2.000.000,-
5	2.000.000,-
6	2.000.000,-
7	2.000.000,-
8	2.000.000,-
9	2.000.000,-
10	2.000.000,-
Total	21.500.000,-

Catatan:

1. Dana digulirkan kepada 10 pengrajin
2. 3 Pengrajin memperoleh masing-masing Rp. 2.500.000,- dan yang lainnya masing-masing Rp. 2.000.000,-
3. Jangka waktu penggunaan 10 bulan.

Setelah digulirkan dana tersebut rencana pengembalian adalah sebagai berikut :

Tabel III.6
Rencana Angsuran Pinjaman 10 Orang (Cash Inflow)

No. Pemin- jam	Bulan (dalam Rp. 000)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275
2	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275
3	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275
4	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
5	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
6	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
7	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
8	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
9	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
10	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
Total	2.365	2.365	2.365	2.365	2.365	2.365	2.365	2.365	2.365	2.365

Catatan: 1. Dana digulirkan bulan September 1999

2. Angsuran pinjaman dimulai bulan November 1999 (artinya angsuran no. 1 adalah bulan November 1999).

Dari rencana angsuran pinjaman pada Tabel III.6 kelihatannya bahwa setiap bulan pengelola memperoleh arus kas masuk (*cash inflow*) sebesar Rp. 2.365.000,-. Dana yang masuk ini digulirkan lagi kepada peminjam ke 11 dan 12. Tergantung pada kebutuhan dan kemampuan pengrajin. Oleh sebab itu jumlah dana yang dipinjamkan kepada pengrajin mungkin sama dengan sebelumnya, tetapi mungkin juga lebih kecil. Tetapi sampai saat ini jumlah yang digulirkan kepada setiap pengrajin lebih kecil dibanding sebelumnya yang ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel III.7

Realisasi Arus Kas Masuk dan Keluar (untuk kelompok II)
Bulan November 1999 s/d Februari 2000

Arus Kas (dalam Rp. 000)	1	2	3	4
Masuk (kelompok I)	2.365	2.365	2.365	2.365
Masuk (kelompok II)	-	-	150	425
Keluar	1.500	1.500	1.500	1.000
		1.000	1.000	1.000
Saldo	865	730	745	790

Catatan:

1. Realisasi arus kas masuk dan keluar dimulai bulan November 1999
2. Arus kas masuk adalah angsuran dari Kelompok I (10 orang) lihat Tabel II.6 dan angsuran dari Kelompok II (7 orang)
3. Arus kas keluar adalah dana yang digulirkan kepada peminjam ke 11 s/d 17
4. Saldo bulan 1 dimasukkan ke bulan 2, saldo bulan 2 dimasukkan ke bulan 3 dan saldo bulan 3 dimasukkan ke bulan 4
5. Biaya operasional pengelola belum diperhitungkan.

3.6. Penutup dan Rencana Evaluasi

Dari uraian di atas termasuk konsep arus kas, dapat disimpulkan bahwa misi yang diemban oleh tim peneliti terbatas sebagai katalisator agar pengusaha kecil di daerah mau dan mampu mengembangkan aktifitas ekonomi yang akan bermanfaat bagi daerahnya. Hal ini sejalan dengan konsep otonomi daerah yang akan dijalankan pemerintahan baru. Langkah lanjut bagi tim peneliti adalah

memilih jenis kegiatan inti lainnya di daerah yang belum terjamah dan memulai lagi kegiatan-kegiatan yang diuraikan dalam laporan ini.

Bagi Propinsi Jambi diharapkan masyarakat akan dapat menarik manfaat dari keberadaan Yayasan ini, baik dalam guliran dana maupun aktifitas kemasyarakatan lainnya yang akan dikembangkan kermudian. Dengan berfungsinya dengan baik Yayasan, dapat disimpulkan bahwa tugas tim peneliti dalam proyek pemberdayaan ini efektif adanya.

Sekalipun demikian tim peneliti tetap melakukan pemantauan melalui laporan-laporan yang dikirim yayasan setiap bulan. Untuk langkah lanjut pemberdayaan, diharapkan pihak yayasan sudah dapat membina jaringan kerja dengan para *stake holder* (lihat bab 1).



DAFTAR PUSTAKA

BPS – Jambi (1998), *Batanghari Dalam Angka*.

Chang, Richard Y; Mark J. Curtin (1998), alih bahasa oleh Martinia Indriati, *Membangun Tim Mandiri*, PT. Pustaka Binaman Pressindo.

Lock, Dennis (1990), alir bahasa oleh E. Jasfi, *Manajemen Proyek*, edisi ketiga, Erlangga Jakarta.

Mackay, Linda Howarth (1986), *Financial Manajemen, How to Make a Go of Your Business*, U.S. Small Business Administration, Washington DC.

Sharma, J.P. (1990), *Small Scale Industry, Problem and Prospects*, Renu Printers, New Delhi.

Zulkarnain Djamin (1984), *Perencanaan dan Analisa Proyek*, Edisi satu, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.



LIPI

KUBE KARYA HARAPAN

Pada tahun 1999 berdiri satu unit usaha yang bernama Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Karya Harapan, selanjutnya disebut Usaha Bersama, dengan anggota 10 orang yang relatif masih berusia muda (antara 20-30 tahun). Sekalipun Usaha Bersama ini relatif masih baru, tetapi sudah dapat meningkatkan pendapatan setiap anggotanya dari Rp. 150.000,- setiap bulan menjadi Rp. 200.000,-. Apa saja yang dilakukan oleh Usaha Bersama ini untuk meningkatkan pendapatan anggotanya, dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengadaan Bahan Baku

Usaha Bersama telah dapat mengadakan “persediaan bahan baku kayu” (*raw material inventory*) yang menyangkut waktu untuk pengeringan kayu sekitar 2 bulan. Tentu saja hal ini terkait dengan dana (uang) yang tersedia atau tersimpan pada bahan baku selama 2 bulan. Dalam hal ini tentunya biaya modal (*cost capital*) harus dipertimbangkan.

2. Pengadaan Bahan Pembantu

Pengadaan bahan pembantu dibeli dalam jumlah besar. Artinya pembelian dalam jumlah besar akan memperoleh potongan harga (*discount*) sehingga harga bahan pembantu lebih murah dibandingkan jika bahan pembantu ini dibeli secara perorangan.

3. Pengadaan Modal

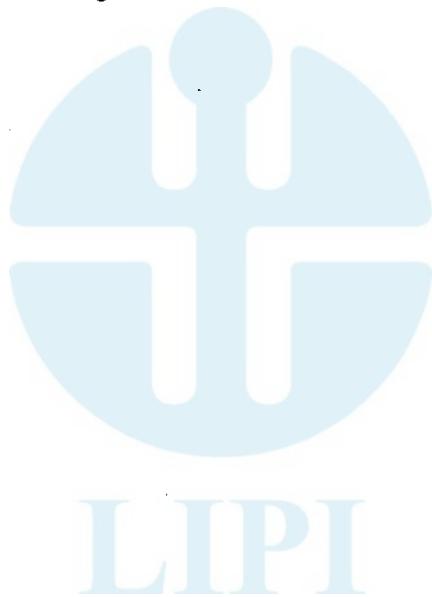
Dilihat dari segi modal, setiap uang yang diterima menjadi pemasukan bagi Usaha Bersama, sehingga pengumpulan dana (*capital accumulation*) dapat berkembang. Selanjutnya setiap anggota yang membutuhkan dana sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukannya dapat memanfaatkan akumulasi modal ini.

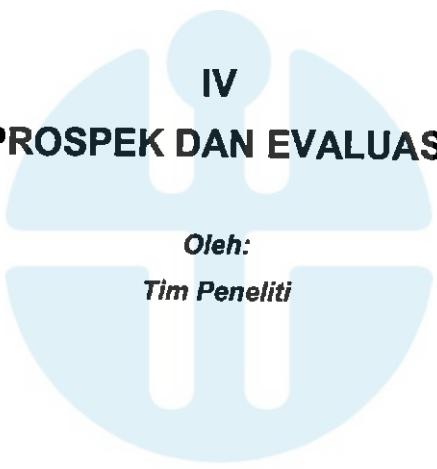
4. Pelaksanaan Pekerjaan

Dilihat dari segi individu tenaga kerja, pekerjaan diperoleh dari unit Usaha Bersama, sedangkan Usaha Bersama memperoleh pekerjaan baik yang berdasarkan pesanan maupun dalam rangka pengadaan barang jadi tanpa pesanan. Dengan cara ini proses produksi dapat dilakukan dengan berkesinambungan (*continous process*). Jadi kalau pesanan tidak ada, pengrajin tetap bekerja dan

hasil pekerjaan mereka menjadi persediaan barang jadi yang ditempatkan di kios milik Usaha Bersama.

5. Tenaga KerjaUntuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, pelatihan untuk membuat ukuran kayu dilakukan baik di Pulau Betung sendiri maupun di luar Pulau Betung seperti di Jepara dan Bali. Fasilitas yang didapatkan melalui Usaha Bersama ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan pengrajin. Di samping itu kalau ada pameran mereka juga diikutsertakan sehingga memperoleh wawasan yang lebih luas mengenai kerajinan kayu. Manfaat lainnya dari mengikuti pameran adalah berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai masukan untuk lebih memahami keinginan/selera konsumen.





IV

PROSPEK DAN EVALUASI

Oleh:

Tim Peneliti

LIPI

IV

PROSPEK DAN EVALUASI

Oleh:
Tim Peneliti

4.1. Pendahuluan

Keberhasilan suatu program pemberdayaan, tampaknya tidak dapat ditentukan secara sepihak dari luar, artinya mereka yang diberdayakan harus ikut aktif dalam menentukan berbagai jalan keluar permasalahan yang mereka hadapi. Program-program pemerintah seperti skim kredit dan berbagai bantuan teknis, tampaknya tidak dapat dilaksanakan dengan target tertentu seperti yang selama ini dilakukan.

Tolok ukur dari keberhasilan berbagai program inipun kurang mengena. Sebagai contoh, yang terjadi selama ini adalah keberhasilan suatu skim kredit diukur dari berapa banyak dana yang berhasil disalurkan kepada mereka yang diberdayakan. Indikator seperti inilah yang menyesatkan dan setelah dievaluasi kasus per kasus baru terlihat adanya penyelewengan-penyelewengan yang mendasar seperti salah sasaran, sehingga kredit dinikmati oleh orang-kaya.

Kesalahan ini bersumber dari informasi, karena sebelum skim ini keluar, informasinya ditangkap oleh mereka yang sebenarnya tidak membutuhkan bantuan. Mereka inilah yang tergesa-gesa mendirikan usaha skala kecil sehingga memenuhi persyaratan untuk mendapatkan skim kredit yang ditawarkan. Jika kasus serupa secara keseluruhan menyerap sekitar 30% dari dana yang disalurkan, salah sasaran ini cukup mendasar. Namun dengan tolok ukur keberhasilan penyaluran dana, maka skim bisa dianggap berhasil.

Disisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa modal merupakan kendala bagi sementara pengrajin, namun evaluasi dan penyempumaan mekanisme perlu dipertimbangkan dan dilakukan secermat mungkin. Berangkat dari kenyataan-kenyataan seperti diatas, program pemberdayaan haruslah sesuatu yang *tailor-made*, yang sesuai dengan ruang, waktu, kondisi, karakteristik dan kebutuhan. Tulisan ini akan membahas prospek dan evaluasi terhadap program pemberdayaan pengrajin kayu rakyat.

4.2. Prospek

Kajian dalam bab 2 dan bab 3 menunjukkan bahwa prospek kerajinan kayu saat ini cukup menjanjikan. Pernyataan ini ada baiknya dikaji dari sisi supply dan demand, sekalipun kajian secara sepintas. Dari sisi supply terlihat bahwa:

1. **Bahan baku.** Hutan di propinsi Jambi masih cukup luas, sekalipun dalam bab 1 terlihat tanda-tanda menurunnya bahan baku kayu yang berkualitas baik, namun dengan adanya HTI masalah ini akan dapat diatasi.
2. **Tenaga kerja.** Bakat alam yang dibutuhkan dalam pembuatan kerajinan kayu tidaklah seperti yang dibutuhkan dalam melukis atau memahat. Karena jenis-jenis kerajinan yang (bisa) ditawarkan bervariasi, dari yang mudah dikerjakan ataupun dapat dibantu dengan alat sampai pada yang membutuhkan keterampilan seni. Disamping itu dalam prosesnya ada yang mudah dikerjakan/dipelajari seperti proses penghalusan dengan amplas, atau proses pengecatan awal. Untuk ini tampaknya sedikit pelatihan sudah memadai sehingga untuk jenis-jenis pekerjaan seperti ini rekrutmen bukan persoalan, karena tenaga kerja cukup tersedia.
3. **Modal.** Dalam hal ini tampaknya perlu bantuan. Apakah untuk modal kerja, maupun peralatan yang dapat digunakan bersama seperti mesin pengering kayu. Dalam pemberian bantuan diperlukan kehati-hatian sehingga salah-sasaran dapat dihindari. Mengingat, dalam upaya pemulihian ekonomi termasuk pula mendaya-gunakan usaha-usaha berskala kecil maka aliran modal ke sektor ini juga bukan merupakan kendala.
4. **Ketrampilan.** Kerajinan kayu Indonesia cukup banyak variasinya, setiap lokasi memiliki ciri sendiri-sendiri; Bali, Jogya dan Jepara dapat diambil sebagai contoh. Jika dirasakan perlu, maka program magang untuk meningkatkan keterampilan dapat saja dilakukan kembali (program pemagangan ke Bali dan Jepara pernah dilaksanakan disini). Keterampilan dalam proses produksi, agar mutu lebih tinggi barangkali perlu diberikan sepanjang hal ini merupakan inovasi baru. Untuk inilah diharapkan ada jaringan kerja dengan Litbang terkait, dan mengingat lembaga seperti ini banyak, maka hal ini bukanlah masalah.

Uraian diatas menunjukkan bahwa dari segi supply prospek usaha perkayuan ini relatif baik, sedangkan dari sisi permintaan tampaknya peluang masih sangat luas, tinggal bagaimana memanfaatkannya saja. Hal ini berdasarkan argumentasi bahwa produk yang dihasilkan dibutuhkan orang sepanjang masa. Hasil produksi kerajinan kayu Jambi memiliki ciri tersendiri dimana produk kerajinan berasal dari kayu bulat/utuh, sehingga kesan etnik amat terasa. Pasar domestik dan asing (seperti Jepang dan Singapore) menggambarkan adanya peningkatan. Jenis produk yang menjadi sorotan dalam laporan ini adalah perabot rumah tangga (meja, kursi, hiasan) dan cendera mata untuk wisata. Hotel dan restoran dapat menggunakannya untuk membuat kesan etnik bagi pengunjung.

Prospek ini akan semakin baik jika persyaratan berikut ini dapat dipenuhi pemerintah daerah:

1. Iklim usaha yang kondusif.

Hal penting yang perlu diupayakan adalah mengembalikan kondisi makro ekonomi yang stabil (tingkat inflasi rendah, tingkat bunga yang rasional), sarana dan prasarana serta mengembalikan *rasa aman* bagi pelaku kegiatan usaha agar terhindar dari tindak kekerasan yang terjadi beberapa waktu lalu.

2. Informasi. Akses terhadap informasi atas hasil produk yang telah ada adalah mutlak dilakukan oleh pemerintah daerah dan instansi terkait. Sedangkan berkaitan dengan informasi bantuan permodalan pengrajin mengalami keterbatasan tentang bagaimana mendapatkan bantuan dana, siapa yang memberikan, siapa yang membutuhkan, dan bagaimana prosedurnya. Informasi inilah yang perlu dimasyarakatkan, sehingga ketika dana itu diperlukan pengrajin akan dapat memanfaatkannya. Informasi ini berlaku juga untuk program pemberdayaan dalam bentuk pelatihan maupun pembinaan. Pelaksanaan program ini tidak selayaknya dengan sistem target, dalam arti peserta harus sekian orang, melainkan barangkali lebih baik dalam bentuk *on-the-job training*. Pemerintah daerah akan lebih bermanfaat jika dapat berperan sebagai pusat informasi bagi *cluster kerajinan kayu* ini. Cluster yang dimaksud disini adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kerajinan kayu sejak dari hulu sampai hilir dengan menyertakan pula kegiatan-kegiatan penunjang semacam litbang.

4.3. Evaluasi

Evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan baru dapat dilaksanakan setelah beberapa waktu, setidaknya setahun. Apa yang dilaksanakan oleh tim terhadap kegiatan pemberdayaan yang telah dilaksanakan lebih bersifat *monitoring*. Dari hasil monitoring sementara ini dapatlah dikatakan bahwa kegiatan ini tepat pada sasarnya, sehingga dana yang kembali sebagianya telah digulirkan ulang. Laporan dikirimkan pada tim secara berkala setiap bulan.

Evaluasi secara keseluruhan direncanakan akan dilakukan akhir tahun 2000. Pada akhirnya nanti Yayasan akan diminta mengajukan program kerja dan melaporkan seluruh kegiatan selama setahun, termasuk neraca dan laporan rugi-laba. Dari hasil tersebut baru akan ditentukan langkah selanjutnya yang akan diambil. Berbagai alternatif yang tersedia dalam garis besarnya akan dapat dikelompokkan dalam kegiatan ekspansi atau kontraksi. Evaluasi secara keseluruhan tersebut dilakukan dengan pendekatan manajemen strategik, sehingga kelangsungan usaha dapat ditentukan.